

MANAJEMEN PEMANGGUNGAN

Proof

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

POLITIK IDENTITAS PADA PILKADA KALIMANTAN TENGAH

(TATAPAN MATA WARGA BAKUMPAI TERHADAP PILKADA KALIMANTAN TENGAH)

Proof

H. FEMIER LIADI
DESI PERAWATI



Airlangga
University
Press



Pusat Penerbitan dan Persebaran
Universitas Airlangga

POLITIK IDENTITAS PADA PILKADA KALIMANTAN TENGAH:

Tatapan Mata Warga Bakumpai terhadap Pilkada Kalimantan Tengah

H. Fimier Liadi, Desi Erawati

ISBN 978-602-473-438-1

©2019 Penerbit Airlangga University Press

Anggota IKAPI dan APPTI Jawa Timur

AUP 905/01.20-0c688/12.19/10

Kampus C Unair, Mulyorejo Surabaya 60115

Telp. (031) 5992246, 5992247 Fax. (031) 5992248

E-mail: adm@aup.unair.ac.id

Layout (Sarah Khairunnisa)

Dicetak oleh:

Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip dan atau memperbanyak tanpa izin tertulis dari
Penerbit sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun.

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)



PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan hikmah, hidayah, dan taufik-Nya kepada tim penulis, sehingga buku **Politik Identitas pada Pilkada Kalimantan Tengah (Tatapan Mata Warga Bakumpai terhadap Pilkada Kalimantan Tengah)** ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam tak lupa kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas jasa beliau kita menjadi seorang mukmin dan muslim yang termotivasi untuk menggali ilmu-ilmu baik agama dan sosial umum lainnya.

Hasil kajian ini berawal dari sebuah penelitian pada tahun 2018 tentang fenomena politik di Indonesia dan di Kalimantan Tengah khususnya. Politik identitas muncul dari beberapa gejolak yang ada seperti pada tahun 2018 dengan gerakan 212 sebagai respons dari interpretasi surat Al-Maidah ayat 51 yang mengalami kesalahan pemaknaan di dalamnya. Kemudian tepat sekali pada tahun 2018, bertepatan dengan pemilihan beberapa bupati di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal inilah yang menarik tim penulis mengkaji lebih detail apakah politik identitas muncul di permukaan melalui *event* kontestasi elektoral politik khususnya pada masyarakat suku Bakumpai di Kalimantan Tengah.

Buku ini terdiri atas 5 (lima) bab yang di dalam pembahasannya membahas tentang gambaran umum yang diawali dengan pendahuluan tentang suku dayak Bakumpai dan dilanjutkan dengan keterkaitan antara politik identitas dengan suku dayak Bakumpai, kemudian diakhiri dengan politik identitas tentu menjadi salah satu penguat dari khususnya bagi petahana, dan menjadi penguat, baik dari aspek kesukuan ataupun dari keagamaan.

Kehadiran buku ini tentunya bisa dijadikan salah satu informasi tentang politik identitas suku dayak Bakumpai dalam kancah kontestasi elektoral di Provinsi Kalimantan Tengah dengan segala keterbatasan secara teoritik maupun lapangan.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak. Terutama pimpinan lembaga (Rektor) IAIN Palangkaraya, dan semua pihak yang turut memberikan kontribusi pemikiran dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan buku Politik Identitas pada Pilkada Kalimantan Tengah (Tatapan Mata Warga Bakumpai terhadap Pilkada Kalimantan Tengah) ini.

Ucapan terima kasih juga tim penulis sampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum baik kabupaten, kota dan provinsi Kalimantan Tengah atas bantuan informasi baik berupa dokumentasi dan lainnya. Demikian pula kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan *stakeholder* baik dari Kementerian Agama dan lainnya.

Tim penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, baik secara teknis dan substansi (isi). Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna perbaikan di masa-masa yang akan datang.

Palangkaraya, November 2019

Tim Penulis



DAFTAR ISI

Prakata.....	v
Daftar Gambar.....	ix
Daftar Tabel.....	xi
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
BAB II	
SUKU BAKUMPAI DAN POLITIK IDENTITAS	7
A. Suku Bakumpai.....	7
B. Suku Bakumpai dan Politik Identitas	16
BAB III	
KONDISI GEOGRAFIS DAN KARAKTERISTIK SUKU DAYAK	
BAKUMPAI DI KALIMANTAN TENGAH	17
A. Bagaimana Kondisi Politik Identitas di Kalimantan Tengah.....	17
B. Populasi Tiga Kabupaten Suku Bakumpai di Kalimantan Tengah	20
C. Karakteristik Suku Dayak Bakumpai	25

BAB IV	
SIKAP POLITIK SUKU BAKUMPAI TERHADAP KONTESTASI POLITIK DI KALIMANTAN TENGAH.....	29
A. Tentang Pilkada Serentak.....	29
B. Beberapa Pendapat Penyelenggara Pemilu tentang Politik Identitas di Kalimantan Tengah.....	32
C. Pandangan Tokoh Agama Islam terhadap Politik Identitas.....	33
D. Sikap Warga Bakumpai terhadap Pilkada Serentak Kalimantan Tengah.....	34
E. Sikap Pemilih Pemula Suku Bakumpai.....	37
F. Sikap Warga Bakumpai terhadap Politik Identitas pada Pilkada Serentak di Kalimantan Tengah.....	43
G. Politik Identitas yang Menonjol di Kalimantan Tengah.....	60
BAB V	
PENUTUP.....	63
Daftar Pustaka.....	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Suku Bakumpai adalah Suku Air	9
Gambar 2.	Peta Provinsi Kalimantan Tengah	21
Gambar 3.	Tata Letak Kabupaten Barito Utara	23
Gambar 4.	Peta Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.....	24
Gambar 5.	Wawancara dengan salah satu kasubag teknis pemilu KPU Kota Palangkaraya	31
Gambar 6.	Wawancara ke salah satu anggota KPU Kabupaten Murung Raya	31
Gambar 7.	Wawancara dengan salah satu komisioner KPU kabupaten Barito Utara.....	32
Gambar 8.	Wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat Dayak Bakumpai.....	35
Gambar 9.	Wawancara dengan para siswa di sekolah.....	38
Gambar 10.	Kantor KPU Kabupaten Murung Raya	40
Gambar 11.	Wawancara dengan beberapa stakeholder di lingkungan Kementerian Agama	42
Gambar 12.	Wawancara dengan salah satu tokoh agama di Kabupaten Murung Raya	45

Gambar 13.	Wawancara dengan tokoh agama Ketua Majelis Ulama Kabupaten Barito Utara	46
Gambar 14.	Wawancara dengan guru dan kepek SD Samba Bakumpai.....	46
Gambar 15.	Wawancara dengan salah satu masyarakat Samba Bakumpai.....	47
Gambar 16.	Wawancara dengan kepek dan ketua TPS 01 Desa Samba Bakumpai.....	48
Gambar 17.	Foto bersama setelah melakukan wawancara	49
Gambar 18.	Wawancara dengan ER.....	50
Gambar 19.	Wawancara dengan SY	51
Gambar 20.	Wawancara dengan BD	52
Gambar 21.	Wawancara dengan Ketua MUI Murung Raya	53
Gambar 22.	Wawancara dengan IH	53
Gambar 23.	Wawancara dengan Mantan Wakil Bupati Mura	54
Gambar 24.	Wawancara dengan Kepala Kemenag Barito Utara ..	56
Gambar 25.	Wawancara dengan Ibu RK	57
Gambar 26.	Wawancara dengan BY	59



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Populasi Suku Dayak di Kabupaten Murung Raya Tahun 2018.....	21
Tabel 2 Data Populasi Suku Dayak di Kabupaten Murung Tahun 2018	23
Tabel 3. Data Populasi Suku Dayak di Kabupaten Katingan Tahun 2018.....	24

Proof



I

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang banyak memiliki suku dan budaya. Salah satu di antaranya adalah Suku Dayak.¹ Suku Dayak sendiri mempunyai kebudayaan yang beragam. Secara bahasa, Dayak pada awalnya bukanlah nama sebuah suku. Yang disebut “Orang Dayak” dalam bahasa Kalimantan, secara umum artinya adalah “Orang Pedalaman” yang jauh dari kehidupan kota. ‘Orang Dayak’ tersebut bukan dikhususkan untuk sebuah suku saja, akan tetapi terdapat bermacam-macam suku. Contohnya, Dayak Kenyah, Dayak Hiban, Dayak Tunjung, Dayak Bahau, Dayak Benua, Dayak Punan, serta masih terdapat puluhan *Uma* (anak suku) yang tersebar di berbagai hutan di wilayah Kalimantan.²

Sebelum abad 20, secara keseluruhan Suku Dayak belum mengenal agama ‘samawi’, baik itu Islam maupun yang lainnya. Mereka mempercayai leluhur, binatang-binatang, batu-batuan, serta isyarat alam yang mereka tafsirkan mirip seperti agama Hindu kuno. Dalam kehidupan

¹ Frodlin Ukur, *Tantang Jawab Suku Dayak* (Jakarta: Gunung Mulya, 2000), 7.

² Nila Riwut, *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan* (Jakarta: Endang, 2007), 21.

sehari-harinya, mereka mempercayai macam-macam pantangan sesuai dengan 'tanda' dari alam.³ Meski demikian, ternyata dari sejumlah suku Dayak di Kalimantan, terdapat suku Dayak yang memeluk agama Islam yakni suku Dayak Bakumpai.⁴ Hal ini perlu dikaji mengingat secara umum suku Dayak selalu diafiliasi dengan penganut ajaran Kaharingan yang telah diwariskan sejak dulu dan identik dengan non-Muslim. Suku Dayak Bakumpai secara fakta di lapangan memiliki sistem sosial dan budaya tersendiri.

Sampai saat ini, sistem sosial dan budaya Suku Dayak Bakumpai terawat dengan baik. Mereka juga mempertahankan dan meneruskan kebudayaan Islam secara damai dan berdampingan dengan suku Dayak Non Muslim, sehingga menarik untuk diteliti tentang dinamika kebudayaan suku Dayak Muslim Bakumpai di Kalimantan Tengah.

Suku Bakumpai adalah suku yang diyakini sebagai suku sub dari Dayak Ngaju, dan merujuk berbagai literatur dan cerita lisan orang Bakumpai sendiri, jelaslah Bakumpai termasuk suku Dayak. Mengetahui Bakumpai sebagai Dayak bisa dilihat menurut Tjilik Riwut suku Dayak terbagi dalam tujuh pembagian besar, yakni Dayak Ngaju; Dayak Apu Kayan; Dayak Iban dan Heban atau Dayak Laut; Dayak Klemantan atau Dayak Darat; Dayak Murut; Dayak Punan; dan Dayak Ot Danum. Di antara tujuh besar tersebut yakni Dayak Ngaju, terbagi lagi dalam empat suku besar, yakni Ngaju, Ma'anyan, Lawangan, dan Dusun. Masing-masing empat besar Dayak Ngaju tersebut terbagi, adapun Bakumpai termasuk bagian dari Dayak Ngaju.⁵

Pengalaman Pilkada serentak yang telah dilakukan oleh KPU di seluruh Indonesia, Apakah Politik Identitas masih sangat dominan terjadi seperti beberapa Pilkada di beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Banten, ternyata Politik Identitas masih terjadi sebagai cerminan homogenitas ideologis politik yang terjadi di tengah masyarakat.⁶

³ Riwut, 74.

⁴ M.Idwar Saleh dkk, *Adat Istiadat Daerah Kalimantan Selatan, Banjarmasin* (Banjarmasin: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977), 7.

⁵ Nila Riwut, *Kalimantan Memanggil* (Jakarta: Endang, 1993), 234–35.

⁶ Syafri Ali, "Politik Identitas Masyarakat Menguat," *Harian Pikiran Rakyat*, January 3, 2018, Edisi 3 edition, 7.

Politik Identitas diasaskan pada esensialisme strategis, di mana kita bertindak seolah-olah identitas merupakan entitas yang stabil demi tujuan politis dan praktikal tertentu. Cressida Hayes, mengatakan bahwa setiap gagasan mengenai diri, identitas, komunitas identifikasi (bangsa, etnisiti, seksualitas, kelas, dan lain-lain), dan politik yang mengalir darinya hanyalah fiksi yang menandai pembakuan makna secara temporer, parsial, dan arbitrer. Politik tanpa penyisipan kuasa secara arbitrer ke dalam bahasa, pemotongan ideologi, pemosisian, persilangan arah, dan retidakan adalah mustahil.⁷

Penanda-penanda identitas 'budaya' boleh berasal dari sebuah kekhasan yang diyakini ada pada agama, bahasa, dan adat resam pada masyarakat yang bersangkutan.⁸

Namun tidak sesederhana itu pula, karena King juga mengatakan bahwa konstruksi identitas budaya bersifat kompleks sebagian karena konstruksi ini merupakan salah satu produk sejarah. Pengamatan hasil Pilkada terdahulu, Politik Identitas muncul setelah Pilkada di beberapa daerah di Indonesia, padahal Kalimantan Tengah menurut beberapa pengamat politik menyatakan bahwa "Pilkada Kalimantan Tengah sangat demokratis, di mana minoritas dapat menjadi penguasa seperti beberapa Gubernur, dari Cilik Riut, K. Silvanus, WA. Gara, dan Teras Narang. Mereka non-Muslim, sedangkan Kalimantan Tengah adalah mayoritas Muslim. Beberapa kabupaten seperti Kabupaten Murung Raya, yang menduduki posisi sebagai bupati adalah Dr. Willy Yosef selama dua periode. Drs. Perdrie M. Yosep, MA., bupati yang bersangkutan tersebut adalah Kristen Protestan, sedangkan Kabupaten Murung Raya penduduknya mayoritas Muslim. Bupati Kabupaten Kapuas, Ir. Ben Brahman yang bersangkutan adalah Kristen Protestan, sedangkan Kabupaten Kapuas mayoritas Muslim. Namun di beberapa daerah non-Muslim seperti di Kabupaten Barito Timur yang mayoritas Kristen Protestan, pemenang Pilkada adalah Ampera A.Y Mebas, SE., yang bersangkutan adalah Kristen Protestan di daerah mayoritas Kristen Protestan. Di Kabupaten

⁷ Heyes Cressida, "'Identity Politics'. Stanford Encyclopedia of Philosophy," n.d.

⁸ Yekti Maunati, *Identitas Dayak, Komodifikasi dan Politik Kebudayaan* (Yogyakarta:

LKiS, 2004), 30.

Gunung Mas, pemenang Pilkada adalah Drs. Anton S. Dohong di daerah mayoritas Kristen Protestan dan yang bersangkutan adalah beragama Kristen Protestan (dihimpun dari data KPUD Kalteng).

Beberapa pengalaman Pilkada Kalimantan Tengah, ternyata Kabupaten di daerah Aliran Sungai (Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, dan Kabupaten Murung Raya) yang mayoritas penduduknya adalah Suku Bakumpai, dari pengamatan peneliti belum ada indikasi Politik Identitas, seperti Kabupaten Murung Raya mayoritas Muslim dan pemenang pilkadanya adalah non-Muslim, Kabupaten Barito Selatan penduduknya seimbang antara non-Muslim dan Muslim, pemenang Pilkada adalah Muslim, demikian pula Barito Utara.

Menjelang Pilkada serentak tahun 2018, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara patut untuk diteliti apakah Politik Identitas masih akan terjadi seperti beberapa Pilkada di daerah Barito Timur dan Gunung Mas.

Partisipasi suku Bakumpai dalam Pilkada pada masa yang lalu sangat dominan. Beberapa peneliti mengatakan, bahwa warga Suku Bakumpai aktif dalam menyukseskan Pilleg dan Pilkada. Warga Bakumpai aktif, meskipun ada dan tidaknya calon Legislatif dan Pimpinan daerah dari Suku Bakumpai ini, mencerminkan bahwa Suku Bakumpai masih belum terkontaminasi Politik Identitas.

Berkaca dengan beberapa Pilkada serentak di beberapa daerah di Indonesia dan dengan terbukanya arus informasi saat ini, pada Pilkada tahun 2018 akan datang tidak menutup kemungkinan arus Politik Identitas juga sudah mulai merambah dalam pemikiran suku Bakumpai. Untuk mendalami pernyataan tersebut, penelitian ini menjadi sangat penting dalam rangka mencari informasi yang dalam berkaitan dengan persepsi warga Bakumpai terhadap Politik Identitas menjelang Pilkada serentak di tiga Kabupaten daerah aliran Sungai Barito, yaitu Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, dan Kabupaten Murung Raya.

Signifikansi dari kajian ini, *pertama*, yaitu untuk memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa politik identitas adalah cerminan masyarakat yang anti demokratis. Gambaran masyarakat seperti ini, perlu pembelajaran politik yang sehat dan demokratis. *Kedua*, yaitu sebagai kajian Sosiologi Politik dalam rangka mencerdaskan masyarakat untuk menata kehidupan berpolitik secara sehat dan demokratis.

Proof

Proof



II

SUKU BAKUMPAI DAN POLITIK IDENTITAS

A. SUKU BAKUMPAI

Suku Bakumpai atau Dayak Bakumpai adalah suku asli yang mendiami sepanjang tepian daerah aliran sungai Barito di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, yaitu dari kota Marabahan, Barito Kuala, sampai kota Puruk Cahu, Murung Raya. Suku Bakumpai berasal dari bagian hulu bekas Distrik Bakumpai, sedangkan di bagian hilirnya adalah pemukiman orang Barangas (Baraki). Sebelah utara (hulu) dari wilayah bekas Distrik Bakumpai adalah wilayah Distrik Mangkatip (Mengkatab) merupakan pemukiman suku Dayak Bara Dia atau Suku Dayak Mangkatip. Suku Bakumpai maupun suku Mangkatip merupakan keturunan suku Dayak Ngaju dari Tanah Dayak. Salah satu tokoh pahlawan dari suku Dayak Bakumpai adalah Panglima Batur sebagaimana gambar tersebut di bawah ini.

Bakumpai juga dimasukkan dalam bagian Dayak Ot Danum yang terdiri atas 68 suku kecil, bersama Bakumpai di antaranya ada Ngaju, Kapuas, Kahayan, Katingan, Sampit, Seruyan. Kemungkinan besar menjadi alasan Tjilik Riwut untuk memasukkan Bakumpai sebagai Dayak Ngaju dan Ot Danum karena melihat kesamaan arti keduanya. Ot Artinya Hulu; dan danum artinya air. Jadi Ot Danum artinya Hulu Air atau Hulu Sungai dengan sendirinya mereka tinggal di udik. Bi-aju artinya; Bi = dari; aju = udik, jadi Bi-aju artinya dari udik. Ngaju = U. Mungkin Tjilik Riwut, secara tidak langsung ingin menampakkan teritorial Dayak Ot Danum berada di daerah sungai.⁹

Pendapat lain tentang Bakumpai, menurut Maulani yang mengutip pendapat Charles Hose antropolog dari Inggris mengemukakan istilah Dayak merupakan nomenklatur kultural untuk sebuah etnik yang tinggal di pulau Kalimantan, meliputi sekitar 200 suku kemudian terbagi ke dalam 6 kelompok besar (Punan, Murut, Kahayan, Iban, Kenyah, dan Klemantan) berdasarkan asal-usul, masa kedatangan ke Kalimantan, dan ciri-ciri budaya mereka.¹⁰

Berdasarkan Charlos Hose dalam Yekti, (2004 :27) meletakkan Bakumpai sebagai salah satu etnik dari ras Kahayan, diduga berasal dari suatu desa yang menyandang nama Bakumpai di hulu sungai Barito. Mereka menyebar ke selatan mendiami sepanjang sungai Barito, berbelok ke sungai Kahayan dan sungai Mentaya Sampit sampai ke Tumbang Samba (Kasongan), Kalimantan Tengah. Dalam persebaran itu, etnik Bakumpai bertemu dengan suku Melayu dan mulai memeluk Islam pada awal tahun 1688 melalui penyebaran Islam dari Kesultanan Demak. Dari hulu sungai Barito, orang-orang Bakumpai menyebar ke hulu sungai Mahakam di Long Putih mengalir ke Selatan sampai ke Long Iram.¹¹

Antara Tjilik Riwut dan Maulani terdapat perbedaan dalam menguraikan silsilah Dayak Bakumpai, namun keduanya memiliki kesamaan bahwa Dayak Bakumpai tinggal di tepi sungai, dalam hal ini adalah sungai Barito. Kemudian diperkuat oleh Setia Budhi dalam

⁹ Riwut, *Kalimantan Memanggil*, 267.

¹⁰ Z.A Maulani, *Pedalaman Kalimantan; Kearifan Budaya dan Etnik dalam Demokrasi dan Pembangunan Daerah* (Yogyakarta: CRDS, Pustaka Pelajar, 2000), 140–41.

¹¹ Maunati, *Identitas Dayak, Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*, 27.



Gambar 1. Suku Bakumpai adalah Suku Air

tulisannya “Melacak Jejak Suku Bakumpai”, bahwa “Sebagian besar peneliti bersepakat bahwa Suku Bakumpai adalah bagian dari rumpun Dayak Ngaju. Hans Scharer (1963) menyebut komunitas ini hidup dan berada di bagian *up river* dan *down river* Barito. Sebagian peneliti lain menyebutkan juga bahwa Suku Bakumpai merupakan cabang dari etnik dusun yang tinggal di bagian pusat Kalimantan yang rapat hubungannya dengan Siang, Deyah, Witu di sebelah Utara dan Kahayan di sebelah Barat.¹²

Beberapa pendapat menyatakan bahwa Suku Dayak Bakumpai (*Belanda: Becompaijers/Bekoempaiers*) adalah salah satu sub etnis Dayak Ngaju yang beragama Islam. Suku Bakumpai terutama mendiami sepanjang tepian daerah aliran sungai Barito di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yaitu dari kota Marabahan (sebagai pusatnya) sampai kota Puruk Cahu, Murung Raya. Suku Bakumpai merupakan suku baru yang muncul dalam sensus tahun 2000 dan merupakan 7,51% dari penduduk Kalimantan Tengah, sebelumnya suku Bakumpai tergabung ke dalam Suku Dayak pada sensus 1930. Suku Bakumpai berasal bagian hulu dari bekas Distrik Bakumpai, sedangkan di bagian hilirnya adalah pemukiman

orang Barangas (*Baraki*). Sebelah utara (hulu) dari wilayah bekas Distrik Bakumpai adalah wilayah Distrik Mangkatip (Mengkati) merupakan pemukiman suku Dayak Bara Dia atau Suku Dayak Mangkatip. Suku Bakumpai maupun suku Mangkatip merupakan keturunan Suku Dayak Ngaju dari Tanah Dayak. Suku Bakumpai banyak mendapat pengaruh bahasa, budaya, hukum adat, dan arsitektur Banjar, karena itu suku Bakumpai secara budaya dan hukum adat termasuk ke dalam golongan budaya Banjar, namun secara bahasa, suku Bakumpai memiliki kedekatan dengan bahasa Ngaju.

1. Politik Identitas

Konteks keterwakilan politik belum meluas dan menginstitusinya partisipasi dan keterwakilan politik masyarakat secara komprehensif telah memicu munculnya kebijakan yang diskriminatif dan eksklusif yang pada akhirnya memperkuat alasan kebangkitan politik identitas etnik. Menurut Barker, karena terdorong perjuangan politik serta minat terhadap filsafat dan bahasa, 'identitas' berkembang menjadi tajuk utama kajian budaya di era 1990-an. Politik feminisme, etnisitas, dan orientasi seks, juga bertajuk-tajuk lain, menjadi minat utama yang memiliki kaitan rapat dengan politik identitas.¹²

Merujuk kepada Eriksen dalam Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z Rubin. (2004:10) bahwa apabila ditinjau dari sudut pandang antropologi, pada semua masyarakat sedang terjadi perubahan identitas sosial dan budaya. Menurutnya, sekurang-kurangnya dalam sepuluh tahun terakhir menjelang abad ke-20, kita dapat melihat secara dramatis rekonseptualisasi konsep kebudayaan dan masyarakat dalam studi-studi ilmu sosial.¹³

Sampai tahun 1960-an, terjadi tumpang tindih antara kebudayaan dan etnitas (diasumsikan bahwa identitas ditentukan oleh etnisitas, sejauh etnik memelihara kekhasan kulturalnya) dengan masalah kewarganegaraan (status kebangsaan seseorang). Namun, kurang lebih tiga puluh tahun berlalu atau sekitar tahun 1990-an, mulai terlihat sebuah perubahan yang

¹² Chris Barker, *Cultural Studies, Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Benteng Pustaka, 1999), 217.

¹³ Dean G dan Jeffrey Z Rubin Pruitt, *Teori Konflik Sosial* (Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2004), 10.

sangat cepat di mana kita tak bisa lagi menunjukkan hubungan langsung antara kebudayaan dan etnisitas. Artinya, identitas etnik belum tentu ditunjukkan lagi oleh kebudayaan dari etnik itu. Menurut Thomas dalam Alo (2003), yang sedang terjadi kini adalah meningkatnya perbedaan budaya kini berubah menjadi identitas etnik sebagai identitas budaya kini berubah menjadi identitas budaya “baru” atau sekedar sebagai identitas sosial semata-mata. Seterusnya Eriksen menjelaskan bahwa apa yang digambarkan itu menunjukkan sekurang-kurangnya dua isu yang selalu terus diperdebatkan.

Pertama, bahwa selalu ada kontroversi tentang primordialisme dan instrumentalisme. Hal ini dikarenakan, identitas etnik pada galibnya merupakan sesuatu yang bersifat “primordial”, yang semula berakar pada kebudayaan yang dihayati bersama secara kolektif “baru” akibat asimilasi dua atau lebih budaya yang didukung oleh perkawinan (amalgamasi) maupun komunikasi antar budaya di tempat kerja, sekolah, dan lain-lain (baca juga Abner Cohen mengenai etnisitas keturunan Afrika di AS).¹⁴ Kolektiva komunitas baru itu dihasilkan oleh keberhasilan mereka memanipulasi simbol-simbol komunikasi bersama yang baru atau menafikan simbol-simbol budaya yang asli dan asal (lihat kasus Sunita Puri di atas, mempertahankan *bindi* sebagai simbol etnik orang indian atau kita dapat membuat *bindi* sendiri dengan membeli cat di toko). Jadi, perdebatan ini berkaitan dengan dikotomi antara mempertahankan karakteristik kebudayaan tertentu secara primordial atau menerima suatu karakteristik kebudayaan tertentu secara primordial atau menerima suatu karakteristik kebudayaan yang baru sebagai sesuatu yang sekedar instrumental.

Kedua, perdebatan antara konstruktivisme dan esensialisme; bahwa yang namanya etnik dan identitas dapat dibentuk dan hasil bentukan etnik baru itu secara esensial menghilangkan atau mengurangi simbol-simbol kultural dari etnik sebelumnya, atau secara esensial pula membentuk karakteristik etnik baru dengan simbol-simbol etnik baru.¹⁵

¹⁴ Alo Liliweri, *Dasar-dasar komunikasi antar budaya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 68.

¹⁵ Liliweri, 53.

Isu inilah yang coba didiskusikan oleh Ernest Gellner dan Anthony D. Smith dalam Ali (2018). Keduanya mencoba “duduk” pada posisi “antara”, di mana di satu pihak kita tetap mengakui keberadaan etnik-etnik, entah dalam rangka etnik itu sendiri atau dalam rangka sebuah bangsa (artinya ada hubungan antara etnisitas dan nasionalisme), dan di pihak lain kita harus berhadapan dengan bentuk etnik baru karena arus modernisasi. Gellner kemudian mengatakan bahwa bagaimanapun juga yang namanya “bangsa” adalah sebuah bentukan atau kreasi modern, sekurang-kurangnya kreasi pemikiran tentang negara. Kalau begitu, perkembangan negara memang harus dibicarakan tanpa mengabaikan bahwa dalam kenyataannya memang ada negara dan bangsa yang terbentuk karena etnisitas dari etnik. Buktinya, kata Gellner, bangsa memang merupakan bentukan dari kelompok etnik yang sekurang-kurangnya ditunjukkan oleh pemimpin (dari etnik mana) yang memerintah.¹⁵ Sebaliknya, Anderson (1983) melihat bahwa bangsa adalah suatu komunitas abstrak atau *imagined community* dari sebuah bangsa, khususnya kelompok etnik. Contoh *imagined community* adalah Filipina dan Indonesia yang merupakan negara multietnik, sehingga kita harus membedakan antara etnik dan bangsa.¹⁶

Apa yang diuraikan di atas merupakan gejala dari transformasi identitas etnik karena perubahan tertentu dari arah sejarah, keadaan sosial ekonomi, kondisi sosial dan politik. Tindakan dan kelompok etnik merespons kemajuan dan modernisasi sebagai suatu perubahan yang selalu harus dan akan terjadi. Suka atau tidak, kini sedang terjadi transformasi identitas etnik. Konsep kemajuan dan modernisasi telah meningkatkan pandangan tentang kebebasan, termasuk kebebasan ekspresi etnik-etnik.

Modernisasi dalam bidang pemerintahan yang demokratis turut membentuk otonomi individual, termasuk otonomi etnik terhadap perubahan struktur dalam masyarakat kita. Kemajuan yang bersifat fundamental tersebut melahirkan masyarakat sipil (*civil society*), yang kini mulai menuntut kembali hak-haknya yang hilang dalam sejarah peradapan etnik-etnik tersebut. Oleh karena itu, definisi sosial terhadap

¹⁶ Koentjaraningrat, *Kebudayaan mentalitas dan pembangunan* (Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama, 2000), 102.

individu kini berubah seiring dengan perubahan struktur kekuasaan, dominasi gender, kekuasaan politik, seperti hak-hak minoritas, termasuk perkembangan agama yang tak membatasi kesukubangsaan sebagai sesuatu yang membatasi peran. Dengan demikian, dalam batas-batas dan konteks tertentu, kita masih membutuhkan pemaknaan etnik secara kontekstual, terutama dalam suasana masyarakat yang multietnik dan multikultur.¹⁷

2. Politik Identitas dengan Fundamentalis

Sebagai bagian dari fenomena global, di Indonesia, politik identitas berdasarkan agama terasa semakin terang benderang terutama sejak kejatuhan rezim Soeharto pada bulan Mei 1998. Setidaknya, bangkitnya kembali *politics of identity* ini terlihat dari munculnya dua gejala politik utama. *Pertama*, terjadinya kerusuhan antar etnis di beberapa daerah seperti Kalimantan Barat, Maluku, Papua, dan Kupang. *Kedua*, terjadinya tindak kekerasan dengan menggunakan sentimen-sentimen agama, seperti yang terjadi pada peristiwa Mataram, Kupang, serta Maluku.¹⁸

Ada beberapa bentuk kekerasan politik agama yang terjadi di Indonesia. *Pertama*, kekerasan fisik seperti pengrusakan, penutupan tempat ibadah, seperti gereja dan masjid maupun tindakan kekerasan fisik lainnya yang menyebabkan objek kekerasan tersebut menjadi terluka, trauma, maupun terbunuh. Bentuk kekerasan yang kedua adalah kekerasan simbolik. *Kedua*, kekerasan simbolik ini dapat berupa kekerasan simiotik seperti berbentuk tulisan-tulisan yang bernada melecehkan sesuatu agama. Pelaku tindakan kekerasan politik agama secara potensial bisa berasal dari setiap kelompok agama di Indonesia. Namun, belajar dari kasus-kasus yang muncul di Maluku, Poso, Mataram, serta Kupang maka bisa ditemukan sebuah kecenderungan bahwasanya sebagian besar kekerasan politik agama yang timbul akibat konflik yang terjadi antara komunitas Islam dan komunitas Kristen. Di Maluku, misalnya, komunitas Islam dan Kristen teridentifikasi melalui ikat kepala dan identitas nama

¹⁷ Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, *Pendidikan Multikultur* (Jakarta: Karya Agung, 2005), 65.

¹⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

2000), 18.

kelompok yang bertikai antara kelompok merah (obet) dan kelompok putih (acang).¹⁹

Data statistik, Kabupaten/Kota yang menjadi ajang pengrusakan masjid dan gereja, dapat dilihat bahwa pengrusakan gereja terjadi di Kabupaten/Kota yang persentase penganut agama Islamnya mayoritas, sedangkan laju pertumbuhan umat Kristennya melebihi laju pertumbuhan umat Islam di daerah tersebut.

Perspektif historis terlihat bahwa kekerasan politik agama merupakan fenomena khas Orde Baru. Ini terlihat dari data yang memperlihatkan bahwa pada masa Orde Lama hampir tidak ada kerusakan yang berlatar belakang agama seperti pengrusakan gereja. Pada kurun waktu 1945-1966, hanya terdapat dua gereja yang dirusak, itu pun terjadi di daerah-daerah yang mengalami gejolak politik dan keamanan bertalian dengan gerakan Darul Islam.²⁰

Sedangkan pada masa Orde Baru (1966-1998) tercatat tidak kurang dari 456 gereja dirusak, ditutup, maupun di resolusi. Perusakan gereja yang terjadi setelah 21 Mei 1998 dapatlah dikatakan sebagai epilog atau warisan Orde Baru. Dalam kurun waktu 1996 sampai dengan akhir April 2000, tercatat 473 gereja dirusak, ditutup atau di resolusi. Dari 473 gereja (100%) tersebut dapat di pinali atas tahun dan tempat kejadian, denominasi gereja, dan bentuk kekerasan fisik serta simbolik. Pada tahun 1996 tercatat 71 gereja (15,01 %) dirusak, dibakar, dan di resolusi, selanjutnya tahun 1997 tercatat 92 gereja (19,45 %), tahun 1998 tercatat 134 gereja (28,33%), tahun 1999 tercatat 123 gereja (26 %), dan tahun 2000 tercatat 53 gereja (11,2%). Berdasarkan tempat kejadian, perusakan gereja terjadi di berbagai pelosok Indonesia meliputi 76 Kabupaten/Kota. Dari 473 gereja, perusakan lebih banyak terjadi di Jawa (273 gereja/57,72 %) dibandingkan dengan di luar Jawa (200 gereja/ 42,28 %). Pengrusakan gereja lebih banyak terjadi di kota pesisir (291 gereja/61,52 %) dibandingkan kota pedalaman (182 gereja/ 38,48 %) Denominasi gereja dibedakan atas Protestan, Pantekosta, dan

¹⁹ Budiardjo, 26.

²⁰ Pruitt, *Teori Konflik Sosial*, 32.

Katolik. Dari 473 gereja tersebut terdiri atas Protestan (240 gereja/50,74 %), Pantekosta (179 gereja/37,84 %) dan Katolik (54 gereja/11,42 %).²¹

Semua label fundamentalisme agama, apakah itu Kristen, Yahudi, Islam, Hindu atau Buddha, senantiasa bertendensi untuk membentuk sebuah sistem berpikir tertutup yang dengan demikian secara sintetis mengisolasi perbedaan pendapat, keraguan, alternatif, dan keterbukaan. Oleh karena itu, tujuannya adalah untuk memberikan keamanan, keyakinan orientasi, identitas yang mantap, dan kebenaran yang menyeluruh. Mereka akan tiba pada sebuah kepastian sistem kepercayaan yang dihasilkan sendiri dan disterilkan terhadap keraguan. Fundamentalisme modern memberikan pelayanan dalam bentuk militannya sebagai legitimasi tuntutan intelektual, agama, dan supremasi terhadap mereka yang berbeda pendapat. Sistem iman yang tertutup dan penerapan peraturan dalam format fundamentalisme mewakili suatu paham kembali secara absolut dalam politik sampai pada batas bahwa mereka berasumsi memiliki peran dalam lingkungan publik dan mematikan kritik, semua alternatif, keraguan, serta dialog terbuka mengenai tuntutan kognitif di antara mereka yang setara.

Apa yang terjadi selanjutnya adalah pengabaian penuh (atau kadang-kadang dalam masyarakat demokratis yang telah berkembang hanya secara selektif) terhadap hak asasi manusia, pluralisme, toleransi, hukum, dan prinsip mayoritas demokrasi atas nama kebenaran yang absolut yang dipercayai oleh kaum fundamentalis. "Dalam budaya barat akhir-akhir ini kita telah menjadi saksi beraneka ragam gerakan fundamentalisme. Fundamentalisme Protestan di Amerika Serikat, fundamentalisme etnis di Balkan atau Jerman, dan Marxisme-Leninisme dalam berbagai bentuknya."²²

²¹ Biro Pusat Statistik, Hasil Banci tahun 2000, BPS, Jakarta, halaman 7. Lihat juga Leo Suryadinata dalam bukunya " Elections and Politics in Indonesia", ISEAS, Singapore, 2002, halaman 2. Ia menyebutkan bahwa : Indonesia is a multi-religious state. There are six major religions, Muslims form the largest group (87,5 %), followed by Christians/Catholics (7,4%), Hindu-Bali (2,0 %), Buddhists (0,9 %) and Confucians (0,8 %).

²² Maurice Duverger, *Sosiologi Politik* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 78.

B. SUKU BAKUMPAI DAN POLITIK IDENTITAS

Suku Bakumpai yang mayoritas beragama Islam, sepertinya tidak lepas dari prinsip primordialis di mana Suku Bakumpai yang taat beragama namun pada sisi modernisasi Suku Bakumpai juga terdepan dalam menyerap informasi global. Terbukti bahwa orang Bakumpai tidak anti dengan pendatang, tidak anti dengan keyakinan lain meskipun pada sisi ini orang Bakumpai agak alergi dengan seseorang yang keluar dari keyakinannya (murtad). Sikap primordial yang mereka pertahankan adalah sikap keberagaman secara luas, dalam arti ada sisi fanatik namun ada juga sisi toleransi. Hingga sampai saat ini “Orang Bakumpai tidak pernah berselisih dengan agama saudara kandungnya Penganut Kaharingan. Ada simbiolisme saling menguntungkan antara kedua anak suku dayak Ngaju ini.”²³

²³ Thambun YC Anyang, *Kebudayaan dan Perubahan Daya Taman Kalimantan Dalam*

Arus Modernisasi (Jakarta: Gramedia, 1998), 56.



III

KONDISI GEOGRAFIS DAN KARAKTERISTIK SUKU DAYAK BAKUMPAI DI KALIMANTAN TENGAH

A. BAGAIMANA KONDISI POLITIK IDENTITAS DI KALIMANTAN TENGAH?

Di zaman Orde Baru, politik identitas di Kalimantan Tengah lebih disebabkan oleh politik kesukuan dengan menuntut kepemimpinan putra daerah asli. Masyarakat Dayak yang merupakan suku asli merasa disingkirkan oleh para pendatang yang datang dari luar Kalimantan Tengah. Orang-orang Dayak menjadi penonton ketika alam dan kampung halamannya dijarah oleh pemimpin yang datang dari luar. Karena itu, ide agar putra daerah menjadi tan di kampung sendiri suatu keharusan sejarah. Tuntutan putra daerah untuk memimpin Kalimantan Tengah

mulai muncul ketika masyarakat Dayak menggugat dan menolak kepemimpinan Warsito Rasman menjadi Gubernur Kalimantan Tengah. Hal ini disebabkan karena paksaan dari atas dan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat Dayak Kalimantan Tengah.

Setelah runtuhnya Orde Baru dan munculnya Era Reformasi yang dimulai tahun 1998, mulai terjadi perubahan politik dari sentralisasi menuju desentralisasi. Momen desentralisasi ini melahirkan pemimpin-pemimpin yang berasal dari putra daerah.

Dimulai dengan terpilihnya Gubernur Asmawi Agani yang bersuku Dayak Bakumpai dan beragama Islam. sebagian orang Dayak yang muslim dan non-Muslim dapat menerima kepemimpinan Asmawi Agani karena merupakan putra asli. Apalagi setelah tampilnya Teras Narang sebagai Gubernur Kalteng selama dua periode (2005-2010 dan 2010-2015), orang Dayak yang beragama Kristen tampaknya disambut dengan suka cita karena memenuhi hajat orang Dayak, terutama yang beragama Kristen. Bahkan dengan pemekaran daerah kabupaten dari 6 kabupaten menjadi 14 kabupaten sebagian dipimpin oleh putra daerah yang beragama Kristen, meskipun masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Hal ini, terjadi di Kabupaten Murung Raya, Katingan, Kapuas, dan Lamandau. Kemudian, setelah berakhirnya masa kepemimpinan periode kedua Agustin Teras Narang dan H. Achmad Diran, tampaknya ada sebagian aspirasi masyarakat untuk memunculkan mantan wakil Gubernur H. Achmad Diran, namun ditolak oleh sebagian masyarakat Dayak yang dipimpin oleh Sabran Ahmad (Ketua Dewan Adat Dayak saat itu). Bahkan mereka melakukan demonstrasi di depan DPRD Kalimantan Tengah. Hal ini membuktikan bahwa politik identitas kesukuan putra asli daerah tampaknya masih timbul sewaktu-waktu bersamaan dengan timbulnya dan menonjolnya politik identitas keagamaan. Akhirnya, ketika pilkada Gubernur Kalteng tahun 2016, mulai muncul politik identitas keagamaan, terutama antara calon gubernur Willy M. Yosep yang beragama Kristen dan calon-calon gubernur H. Sugianto Sabran yang beragama Islam. Kemudian, Pilkada tersebut dimenangkan oleh H. Sugianto Sabran yang beragama Islam. Bagaimanapun politik identitas kesukuan dan keagamaan selalu muncul di saat pilkada di Kalteng. Kemunculannya tampaknya

lebih banyak disebabkan oleh perasaan primordialisme dan perasaan ketidakadilan.

Agaknya ada pergeseran politik identitas di Kalimantan Tengah, dari politik identitas kesukuan ke politik identitas keagamaan. Apalagi setelah hebohnya di media massa dan media sosial tentang kasus Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), Gubernur DKI Jakarta yang mencalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ahok dinilai oleh ulama melecehkan kitab suci Alquran, surah al-Maidah ayat 51 atau menghina ulama yang dianggap berbohong. Lebih dari itu, terpilihnya Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang beragama Kristen dan cenderung fobia terhadap Islam, juga menimbulkan rasa ketidakadilan negara Adi Kuasa tersebut terhadap umat Islam. Kasus Ahok dan Donald Trump ini agaknya mempunyai efek dan pengaruh juga ke masyarakat di daerah dalam pemilihan kepemimpinan, sehingga pilkada di daerah, baik pemilihan Gubernur, Walikota, atau Bupati seringkali muncul politik identitas keagamaan.

Menurut ES (Mantan Ketua Bawaslu dan sekarang menjadi salah satu anggota KPU Kalteng), mengatakan bahwa sebenarnya politik identitas keagamaan di Kalimantan Tengah sudah pernah terjadi di salah satu kabupaten yaitu kabupaten Kapuas, di mana pada 5 tahun yang lalu, ketika ada seorang penceramah di ruang tertutup yang mengutip ayat Alquran untuk memilih calon pemimpin muslim (H. MW) yang lawannya saat itu adalah (Ir. Bn) yang beragama Nasrani. Namun, video ceramahnya beredar di media sosial, sehingga menimbulkan kehebohan di tengah masyarakat. Namun, menurut ES, apa yang disampaikan oleh penceramah itu tentang memilih pemimpin muslim tidaklah melanggar aturan sepanjang tempat atau sarana ceramahnya bersifat tertutup dan komunitasnya pada kalangan umat Islam sendiri dan disampaikan oleh yang ahlinya atau penceramah agama Islam. Dalam penyampaian isi ceramah tersebut tentang kriteria pemimpin harus muslim. Orasi ini pun di tempat ibadah sendiri seperti di masjid juga tidak bertentangan dengan aturan. Hal ini juga disetujui oleh ketua Bawaslu Kalimantan Tengah Bapak St. Apalagi sekarang ini, bisa didengar secara terbuka lewat Youtube, ceramah Ustadz Abdul Somad disingkat dengan UAS yang terbuka di muka umum dan beredar

di media sosial, serta disenangi oleh sebagian besar masyarakat muslim, menyampaikan ceramah agama bahwa seorang muslim atau muslimah

harus memilih pemimpin yang muslim atau muslimah. Dengan mengutip pendapat Yusuf al-Qaradhawi tentang perjanjian ruh yang mengakui Allah sebagai Tuhannya, menurut UAS, memilih pemimpin non-Muslim adalah menyalahi awal perjanjian ruh dengan Allah sebagai Tuhannya.

Konteks Pilkada Serentak Tahun 2018 di Kalteng, khususnya di Kabupaten Katingan, Barito Utara, dan Murung Raya, timbul pertanyaan, Apakah muncul politik identitas kesukuan dan atau keagamaan oleh suku Bakumpai dalam kontestasi Pilkada Tahun 2018? Pertanyaan ini menjadi penting karena di tiga kabupaten tersebut terdapat calon Bupati yang berasal dari Suku Bakumpai.

B. POPULASI TIGA KABUPATEN SUKU BAKUMPAI DI KALIMANTAN TENGAH

1. Kabupaten Murung Raya

Profil Kabupaten Murung Raya merupakan daerah pemekaran Kabupaten Barito Utara pada tahun 2002 dengan luas wilayah 38.617 km² dan berpenduduk sebanyak 97.029 jiwa dan berpenduduk sebanyak 97.029 jiwa. Semboyan kabupaten ini adalah “*Tira Tangka Balang*” (Maju Terus Pantang Mundur). Kabupaten ini terdiri atas 10 kecamatan, 124 desa, dan 9 kelurahan, yaitu Murung, Laung Tuhup, Permata Intan, Sumber Barito, Sungai Babuat, Tanah Sang Selatan, Barito Tuhup Raya, Seribu Siam, dan Uut Murung.

Adapun jumlah penduduk kabupaten Murung Raya berdasarkan suku seperti dayak Bakumpai sebesar 56,35%, sedangkan jumlah penduduk berdasarkan agama seperti Islam 70.332 orang, Protestan 24.915 orang, Katolik 6.758 orang, Hindu 16.587 orang.²⁴

Kabupaten Murung Raya adalah salah satu Kabupaten yang berada di perbatasan sebelah utara dengan Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Kabupaten Murung Raya berdiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pemekaran 8 (delapan) Wilayah Administratif di Kalimantan Tengah.

²⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, “Data Jumlah Penduduk

Berdasarkan Suku dan Agama” (BPS, 2018).



Gambar 2. Peta Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 1. Data Populasi Suku Dayak di Kabupaten Murung Raya Tahun 2018

No	Nama Suku	Jumlah	Persentase (%)
1.	Ngaju	4.395	4,05%
2.	Bakumpai	61.157	56.35%
3.	Sampit	11	0,01%
4.	Manyan	1.140	1,05%
5.	Lamandau	29.238	26,94%
6.	Dayak lainnya	95.941	88.40%
7.	Suku lain	12.589	11.60%
Jumlah		108.530	100%

Kabupaten Murung Raya Ibukota kabupaten ini terletak di Puruk Cahu. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Barito Utara pada tahun 2002 dengan luas wilayah 23.700 km² dan berpenduduk sebanyak 108.530 jiwa (sensus Penduduk Tahun 2017). Semboyan kabupaten ini adalah “*Tira Tangka Balang*”. Dengan partisipasi pemilih 66,49%.²⁵

Kabupaten Murung Raya terdiri atas 10 kecamatan, 115 desa, dan 9 kelurahan, yaitu:

1. Kecamatan Murung
2. Kecamatan Tanah Siang
3. Laung Tuhup
4. Permata Intan

²⁵ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mura, “Data Jumlah Pemilih Tetap” (KPU kabupaten Murung Raya, 2018).

5. Sumber Barito
6. Sungai Babuat
7. Tanah Siang Selatan
8. Barito Tuhup Raya
9. Seribu Riam
10. Uut Murung

Dapat dilihat pada gambar 2, tentang peta Kalimantan Tengah atau Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

Suku mayoritas di Kabupaten ini adalah Suku Bakumpai sebagaimana data di tabel 1.

2. Kabupaten Barito Utara

Kabupaten Barito Utara adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, Ibukotanya Muara Teweh. Kabupaten ini berdiri pada tanggal 29 Juni 1959. Semboyan Kabupaten ini adalah *"Iya Mulik Bengkang Turan"*. Posisi Kabupaten Barito Utara pada $114^{\circ} 27' 00''$ – $115^{\circ} 49' 00''$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 58' 30''$ Lintang Utara – $1^{\circ} 26' 00''$ Lintang Selatan. Wilayah Barito Utara meliputi pedalaman daerah aliran Sungai Barito yang terletak pada ketinggian sekitar 200-1.730 m dari permukaan laut. Bagian selatan merupakan dataran rendah dan bagian utara merupakan dataran tinggi dan pegunungan. Potensi terbesar kawasan ini ada pada sektor kehutanan, pertambangan (batu bara dan emas), sedangkan untuk sektor perkebunan adalah kelapa sawit dan karet. Sektor kehutanan dan perkebunan karet sudah cukup lama turut menyumbang pemasukan bagi negara sedangkan sektor pertambangan seperti tambang emas juga memberi andil yang cukup besar. Tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit saat ini sudah mulai berproduksi yang nantinya diharapkan dapat memberikan pemasukan yang cukup besar bagi negara dan daerah. Jumlah penduduk saat ini adalah 181.901 jiwa tersebar di 9 kecamatan, 93 desa, dan 10 kelurahan, yaitu:

1. Gunung Purei
2. Gunung Timang
3. Lahei
4. Montalat



Gambar 3. Tata Letak Kabupaten Barito Utara

Tabel 2 Data Populasi Suku Dayak di Kabupaten Murung Tahun 2018

No	Nama Suku	Jumlah	Persentase (%)
1.	Ngaju	1.910	1,05%
2.	Bakumpai	81.255	44.67%
3.	Sampit	18	0,01%
4.	Manyan	7.022	4,19%
5.	Lamandau	45.657	25.10%
6.	Dayak lainnya	136.462	75.02%
7.	Suku lain	45.430	24.98%
Jumlah		181.901	100%

5. Teweh Tengah
6. Teweh Timur
7. Teweh Selatan
8. Teweh Baru
9. Lahei Barat

Sebagaimana terlihat pada gambar 4, tentang tata letak kabupaten Barito Utara.

Adapun daftar pemilih tetap di kabupaten Barito Utara sebesar 95.521, pemilih laki-laki sebanyak 49.487, perempuan sebanyak 46.034. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan agama dan suku sebagai berikut: Islam;

97.916, Protestan; 13.829, Katolik; 7.535, Hindu; 34.177.²⁶ Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan suku atau etnis suku dayak Bakumpai sebesar 44,67%.²⁷

Suku mayoritas di Kabupaten ini adalah Suku Bakumpai, sebagaimana data di tabel 2

3. Kabupaten Katingan

Kabupaten Katingan adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kasongan.

²⁶ Kementerian Agama Kab. Barut, "Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara; jumlah umat beragama" (Kemenag Barut, 2018).

²⁷ Tengah, "Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku dan Agama."



Gambar 4. Peta Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 3. Data Populasi Suku Dayak di Kabupaten Katingan Tahun 2018

No	Nama Suku	Jumlah	Persentase (%)
1.	Ngaju	103.991	70,97 %
2.	Bakumpai	1172	0,80%
3.	Sampit	484	0,33%
4.	Manyan	190	0,13%
5.	Lamandau	6.726	4,59%
6.	Dayak lainnya	112.563	76,82 %
7.	Suku lain	33.965	23,18%
Jumlah		146.528	100%

Kabupaten ini memiliki luas wilayah 17.800 km² dan berpenduduk sebanyak 146.528 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2017). Semboyan kabupaten ini adalah “*Penyang Hinje Simpei*”. Kabupaten ini terdiri dari 13 kecamatan. Adapun gambar peta kabupaten Katingan dapat dilihat pada gambar 4 sebagai berikut:

Adapun data kependudukan berdasarkan suku sebagaimana Tabel 3 berikut ini:

Suku Bakumpai di Kabupaten Katingan tersebar di beberapa Kecamatan, yaitu Mendawai, Katangan Hilir, Katingan Tengah, dan populasi terbanyak ada di Kecamatan Katingan Tengah di dua Desa yaitu Desa Tumbang Samba Bakumpai dan Samba Katung. Suku Bakumpai di Kabupaten Katingan mayoritas adalah petani, nelayan, dan pedagang.

Suku Bakumpai yang ada di Kabupaten Katingan mayoritas terkonsentrasi di Samba Bakumpai, menurut data Kabupaten Katingan setidaknya ada 80% lebih warga Bakumpai ada di Katingan Tengah di Desa Samba Bakumpai dan Desa Katung.

Semboyan kabupaten ini adalah “*Penyang Hinje Simpei*”. Kabupaten ini terdiri atas 13 kecamatan.²⁸ Adapun jumlah penduduknya berdasarkan etnis dayak Bakumpai sebanyak 0,80% dari data penduduk berdasarkan agama, Islam sebanyak 97,538, Protestan 22,421, Katolik 2,892, Hindu 36,277.²⁹

C. KARAKTERISTIK SUKU DAYAK BAKUMPAI

Bakumpai merupakan bagian dari suku-bangsa Dayak. Hal ini dapat diketahui menggunakan berbagai pandangan berbagai tokoh, seperti Tjilik Riwut, Maulani, dan secara kebahasaan oleh Ibrahim maka jelaslah Bakumpai termasuk bagian dari suku bangsa Dayak. Bahkan Tjilik Riwut telah mengidentifikasi Bakumpai sebagai sub suku bangsa Dayak dari kelompok Ngaju dan Ot Danum.

²⁸ Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, “Jumlah Penduduk di Kalimantan Tengah Berdasarkan Suku” (BPS, May 14, 2018).

²⁹ Kementerian Agama kabupaten Katingan, “Data Jumlah Penduduk Berdasarkan

Agama” (Kemenag Katingan, 2015).

Persoalan selanjutnya adalah telah terjadi kesalahpahaman selama ini yang menimpa atau dialami orang Bakumpai yang memeluk Islam tidak lagi menyebut dirinya Dayak. Kasus yang sebenarnya tidak hanya menimpa orang Bakumpai saja juga Dayak Meratus dan Dayak Kenyah. Kedua, fakta ke-Islaman orang Bakumpai sudah jelas tak terbantahkan terbukti dalam praktik keagamaan yang dijalankan dan kepercayaan lokal yang masih bertahan. Poin pertama dan kedua menjelaskan posisi Bakumpai sebagai muara dari pertemuan tradisi Dayak dan tradisi Islam.³⁰

Para ahli antropolog menyatakan bahwa orang Bakumpai berasal dari suku Dayak pedalaman (*mountain people*), dan Kedua berpendapat bahwa orang Bakumpai berasal dari pesisir pantai (*coastal people*) manakala pendapat Ketiga merujuk pada peristilahan Bakumpai.³¹

Bakumpai sebagai bagian dari suku-bangsa Dayak jelas menjalankan tradisi Dayak baik secara sadar maupun tidak disadari. Penggunaan bahasa Bakumpai, sebagai bahasa yang juga dipahami kebanyakan Dayak Ngaju sangat berpengaruh terhadap aspek berpikir, bertindak, dan bersikap. Secara mistis, orang Bakumpai juga mengenal makhluk halus dari yang suka mengganggu manusia hingga yang membantu manusia dalam penyembuhan. Tradisi Islam, orang Bakumpai menjalankan kewajiban rukun Islam dengan berbagai kegiatan keagamaan yang terpengaruh oleh suku bangsa Banjar sebagai mayoritas pemeluk Islam. Pertemuan antara tradisi Dayak dan tradisi Muslim ini mewujudkan dalam diri orang Bakumpai. Sehingga pelaksanaan ajaran agama terpengaruh tradisi lokal.³²

Orang Bakumpai menurut penelitian beberapa ahli termasuk rumpun Ot Danum, suku Dayak Ngaju, karena itu lebih tepat kalau disebut sebagai Dayak Bakumpai. Suku Dayak Bakumpai konon menurut ceritera rakyat dahulunya memiliki kerajaan yang lebih tua dari Kerajaan Negara

³⁰ Nasrullah, Nasrullah, “‘Mampalampang’ Budaya Dayak Bakumpai (Sebuah Diskusi Awal)” (seminar Bakumpai Pengurus Cabang Kerukunan Keluarga Bakumpai, Aula Asrama Haji Palangka Raya, 11 2017), 6.

³¹ Setia Budhi, “Etnisitas dan Penyebaran Orang Bakumpai Rekonstruksi Sosial Huma Hai” (April 11, 2017), 2.

³² Nasrullah, Nasrullah, “‘Mampalampang’ Budaya Dayak Bakumpai (Sebuah

Diskusi Awal),” 7.

Dipa, Namun dalam perkembangannya tersisih ke sungai Barito yaitu ke Marabahan, dan dari Marabahan mereka menyebar ke hulu sungai Barito. Sebagai rumpun dari Suku Dayak ini besar kemungkinannya, orang Bakumpai memang berasal dari hulu Sungai Barito dan hulu Sungai Kahayan. Mereka ini dahulu adalah orang Dayak yang biasa milir ke muara sungai untuk berbagai keperluan. Lama kelamaan mereka bermukim di suatu kawasan Muara Barito atau Kuala Barito yang lebih populer disebut Barito Kuala. Pemahaman bahwa mereka berasal dari hulu (bi-ngaju), bisa cocok dengan semacam dongeng ceritera rakyat orang Bakumpai. Banyak ceritera rakyat yang sudah di unggah ke dalam *web internet* atau media sosial lainnya yang sedang giat menggali asal muasal orang Bakumpai.³³

Menurut Ilmu Antropologi yang mempelajari ciri, kebiasaan, perawakan, dan penyebaran suatu bangsa, setiap bangsa memiliki ciri-cirinya sendiri yang biasanya berbeda satu sama lain. Watak atau karakter orang-orang Bakumpai menurut pandangan Schwaner, yang ditulisnya dengan cara khas stereotip Eropa yang rasialis, sangat tidak enak dibaca oleh orang Bakumpai sekarang. Apa yang ditulis Schwaner ini sangat *tendensius*, sangat merendahkan orang Bakumpai, sangat merugikan orang Bakumpai karena tulisan itu bisa menjadi referensi bagi tulisan-tulisan lain selanjutnya. Penulis ingin memberikan semacam *clarification of value* tentang pendapat yang *stereotip* tersebut, karena tulisan Schwaner hanyalah sebuah laporan perjalanan, laporan sepihak yang belum jelas validasinya.

³³ Rizali Hadi, *Mengungkap Peran Orang Dayak Bakumpai Memelopori Perdagangan ke Sungai Katingan* (Banjarbaru, Kalimantan Selatan: PADMA Publisher & Communications,

2015), 8.

Proof



IV

SIKAP POLITIK SUKU BAKUMPAI TERHADAP KONTESTASI POLITIK DI KALIMANTAN TENGAH

A. TENTANG PILKADA SERENTAK

Berdasarkan Peraturan Pemilu Nomor 10 Tahun 2018 bahwa KPU bersama partai politik wajib melakukan sosialisasi dan pendidikan politik “kita melakukan sosialisasi Pilkada serentak di daerah Kabupaten /Kota masing-masing” dari salah seorang Komisioner KPU Kota Palangkaraya. Mengingat luasnya jangkuan daerah yang dilalui, maka KPU Kota Palangkaraya membentuk Relawan Muda Pemilu yang membantu KPU dalam mensosialisasikan pemilu yang jujur dan beradab. SA (nama inisial) salah seorang Relawan Muda “kami diterjunkan ke Sekolah Pemilih Pemula (Kelas XI dan XII SMA/SMK dan MA se-kota Palangkaraya). Bahkan beberapa relawan ditugaskan untuk mensosialisasikan pemilu di kalangan mahasiswa baru di beberapa perguruan Tinggi Negeri dan swasta.

Wawancara yang dilakukan juga dengan FT (nama samaran) salah seorang bagian administrasi KPU Kota Palangkaraya terlihat pada Gambar 8 yang mengatakan bahwa untuk membantu mensosialisasikan pemilu dan tahap-tahapnya KPU menggandeng relawan muda yang dibentuk KPU kota. Di mana setiap KPU membuka tempat komunikasi masyarakat bernama Kape Wahana yang sepertinya sepi dengan pengunjung. Meskipun demikian, informan FT dan kawan-kawan membuat terobosan untuk memaksimalkan sosialisasi pilkada agar partisipasi masyarakat bisa maksimal sebagaimana diungkapkan oleh informan FT di bawah ini:

“kemarin kami merekrut ya melihat kebutuhannya tadi memang ada, melihat adanya partisipasi. Partisipasinya mencakup sekian. Melihat hal tersebut, maka anggap divisi kami perlu mengusulkan anggaran. Karena kami mengusul anggaran dulu baru kami bentuk. Karena anggaran secara ekonomis ada bila kita usulkan, dasar kita itu dulu. Kedua kita melihat ada partisipasi yang sudah-sudah lumayan bagus. Jangan sampai kegiatan sosialisasinya terpotong atau tidak terlaksana. Tujuan dari relawan tersebut untuk membantu kami KPU untuk melaksanakan sosialisasi di berbagai tempat SEKRE. Kami punya 5 sekre. Ya kami akan menyisihkan di bagian agama. Melalui dia khutbah, ceramah, dakwah yang menyinggungkan pemilu, kapan pemilu itu dan jangan sampai golput. Karena kami juga terbatas KPU nya. Maka kami minta pemula itu yang akan ke sekolah-sekolah. Adapun dari sektor perempuan dia larinya ke ibu-ibu misalnya arisan. Kalau bagi yang kristenkan di gereja ada perkumpulan perempuan. Terus segumen pikiran itu di kalangan masyarakat biasa. Jadi agar sampai tujuan pemilu pilkada kami, yaitu agama, perempuan, segumen, pisabilitas dan pemula. Pemilih pemula itu ke sekolah-sekolah bu”. (Wawancara dengan informan FT, kasubbag Teknis Pemilu, KPU Kota Palangka Raya)

Diharapkan dengan terbentuknya relawan muda ini, akan menaikkan taraf partisipasi masyarakat dalam pemilu naik signifikan. Kalau sosialisasinya kan kami selalu maksimal sudah, cuma kita kurang tau masyarakat itu kalau dari tingkat partisipasi pemilu pilkada sekarang agak berkurang, padahal kami semaksimal mungkin sudah dalam sosialisasi. Jadi 60% sekian dari kemarin 70% sekian. Target 70% lebih ini sepertinya tidak mudah untuk dijangkau, namun KPU kota berupaya



Gambar 5. Wawancara dengan salah satu kasubag teknis pemilu KPU Kota Palangkaraya

semaksimal mungkin agar target partisipasi bisa lebih dari 70%. Untuk itu, pihak KPU Kota Palangkaraya berupaya meminimalisasi kendala, yaitu dengan memaksimalkan tugas relawan muda yang masuk ke ranah-ranah sosial seperti ke Pemilih Pemula di SMAN, MAN, SMKN, SMA S, MA S dan SMK S, Pondok Pesantren, dan Perguruan Tinggi yang ada di Kota Palangkaraya.

Hal serupa disampaikan oleh salah satu informan IZ (nama samaran) dari KPU Murung Raya. Di mana pola sosialisasi yang dikembangkan agak berbeda dengan KPU Kota Palangkaraya, misalnya dengan membuka stan kunjungan bagi masyarakat dengan memberikan souvenir gratis. “Kawan-



Gambar 6. Wawancara ke salah satu anggota KPU Kabupaten Murung Raya



Gambar 7. Wawancara dengan salah satu komisioner KPU kabupaten Barito Utara

kawan memanfaatkan stan Kafe Wahana yang melayani masyarakat dalam mencari nama yang bersangkutan masuk atau tidak dalam daftar pemilih tetap (DPT), untuk kunjungan itu kita menyiapkan souvenir boneka kepada masyarakat pengunjung ungkap salah satu komisioner KPU Murung Raya informan FK (nama samaran) pada peneliti di ruang kerja KPU, sebagaimana terlihat pada Gambar 6, peneliti melakukan kunjungan langsung ke kantor KPU Kabupaten Murung Raya.

Sosialisasi pilkada, pihak KPU Barito Utara menggandeng Radio Pemerintah Daerah dan Pihak Sekolah/Madrasah yang ada di Kabupaten Barito Utara. Demikian pula dengan pihak KPU Katingan, melaksanakan sosialisasi dengan menyebarkan pamflet dan selebaran tentang pilkada serentak tahun 2018.

Pada gambar 7, peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa informan baik dari kalangan tokoh agama, kementerian agama, KPU, tokoh masyarakat, dan kalangan masyarakat lainnya.

B. BEBERAPA PENDAPAT PENYELENGGARA PEMILU TENTANG POLITIK IDENTITAS DI KALIMANTAN TENGAH

Salah satu tim komisioner KPU Provinsi Kalimantan Tengah HR (nama samaran) mengatakan bahwa “Di Kalimantan Tengah tidak nampak adanya politik identitas, dan kami tidak atau belum menerima berita adanya politik identitas. KPU sifatnya penyelenggara atau partisipan,

dan tidak ada laporan masyarakat tentang politik identitas, mungkin ke Bawaslu. KPU selaku penyelenggara melakukan kegiatan pemeriksaan keabsahan calon, jika syarat calon terpenuhi maka calon itu sah untuk menjadi kontestan politik baik Pileg maupun Pilkada”.

Sama halnya yang diungkapkan oleh SS (nama samaran), “Memang sudah diperkirakan bahwa efek kasus Ahok akan terbawa ke Pilkada Kalimantan Tengah. Politik Identitas kalau kita lihat ada dua sisi, yaitu agama dan suku. Dari hasil pengamatan kami Bawaslu di Kalimantan Tengah belum terlalu muncul secara signifikan. Isu-isu politik identitas itu adalah mainan elit politik partai, dan di saat ini politik identitas tetap ada. Ada muncul tetapi senyap bukan pada pola kampanye. Jadi politik identitas dimainkan oleh elit politik secara fungsional bukan jadi andalan kampanye. Sebab jika isu politik identitas digunakan secara terbuka, jelas sudah melanggar hukum seperti menggunakan isu **sara dan kesukuan** dengan menghembuskan *black campaign* hingga membunuh karakter pihak lawan. Meskipun demikian, politik identitas juga tidak bisa dihindari misalnya ada calon pimpinan daerah mengajak masyarakat memilih pimpinan seiman, asal dilakukan pada komunitasnya itu masih ditoleransi, dan bukan dilakukan pada komunitas umum hingga menjelek-jelekan lawan politiknya dan itu jelas melanggar hukum dan aturan pemilu”. Keyakinan yang disampaikan oleh tim KPU provinsi mengungkapkan bahwa masyarakat Kalimantan Tengah sudah memiliki kecerdasan dalam menentukan pilihan, kalau dilihat pada pemilihan pemimpin daerah di Kabupaten Murung Raya, politik identitas tidak nampak di permukaan. Demikian pula dengan Katingan. Namun pada area-area tertentu misalnya di Katingan Tengah tempat salah satu calon yang berasal dari salah satu kecamatan di mana dimenangkan oleh calon itu sendiri karena bagian dari daerah tersebut, dan ini artinya politik identitas berlaku di daerah tersebut”.

C. PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TERHADAP POLITIK IDENTITAS

Berbicara tentang politik identitas, beberapa tokoh ulama baik dari tingkat lokal maupun tingkat nasional, juga mengamati fenomena tersebut.

Politik identitas terjadi bersamaan dengan politik desentralisasi, di mana pasca penetapan UU No. 22/1999, gerakan politik identitas semakin jelas. Faktanya, banyak aktor baik lokal dan politik nasional menggunakan isu ini secara intens untuk pembagian kekuasaan.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof Din Syamsuddin, mempunyai pandangan yang berbeda soal politik identitas. Identitas dalam politik, menurutnya, tidak bisa dieenyahkan. Sebab itu melekat dalam diri manusia. Hal yang terpenting dari sebuah politik identitas adalah ditampilkan dalam kerangka nilai-nilai etika dan moral. Bukan identitas yang bersifat label formalistik belaka, ujarnya kepada awak media termasuk³⁴ yang paling penting dari identitas politik itu, kata Din, adalah ruh dan semangatnya. Terkait politik identitas keislaman, Din menyebutkan ada dua kalangan. Kalangan yang pertama adalah kalangan yang berpolitik dengan menonjolkan lambang-lambang Islam. Sementara kalangan yang kedua adalah kalangan yang berpolitik dengan mengedepankan nilai, etika, dan moralitas keislaman. "Itu sah-sah saja," kata Din. Din tidak menafikan kalangan yang menekankan simbol Islam dalam berpolitik. Tapi pesannya, jangan mengira kalangan yang tidak menonjolkan simbol Islam itu tidak berjuang untuk kepentingan umat Islam.

Pernyataan Prof Din Syamsudin senada dengan pernyataan salah satu tim Bawaslu Kalimantan Tengah ST (nama samaran), "politik identitas itu sah-sah saja, asal tidak mematikan karakter lawan, seperti menghina dan menistakan kelompok lain. Jika yang dimunculkan adalah prestasi dan program calon dengan untuk kemaslahatan kelompoknya saya kira tidak jadi masalah".

D. SIKAP WARGA BAKUMPAI TERHADAP PILKADA SERENTAK KALIMANTAN TENGAH

Berkenaan dengan sikap warga Bakumpai terhadap Pilkada Serentak Tahun 2018, menganggap pesta demokrasi yang secara rutin dilaksanakan oleh pemerintah setidaknya hampir 20 tahun belakangan ini.

³⁴ Din Syamsuddin, "Din: Politik Identitas Itu Sah-Sah Saja," Hidayatullah.com, August 7, 2018, URL.



Gambar 8. Wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat Dayak Bakumpai

Ditenggarai warga Bakumpai disebut tidak peduli dengan suksesi pemimpin ini ada benarnya, karena tidak ada persiapan khusus untuk ikut serta berpartisipasi dalam pesta pemilihan Pimpinan Daerah, seperti diungkapkan oleh salah satu penasihat organisasi kerukunan keluarga Bakumpai AN (nama samaran) yang berpusat di Banjarmasin mengatakan “Warga Bakumpai secara umum berprofesi sebagai petani, nelayan, pedagang, pendidik (guru, dosen), dan pejabat pemerintah, yang tidak secara khusus menyiapkan diri untuk berkompetisi sebagai pimpinan daerah.” ungkap beliau yang diwawancarai saat usai Pelantikan Pimpinan Pusat KKB di Banjarmasin (Tanggal 6 September 2018), terlihat pada Gambar 8.

Warga Bakumpai yang masuk dalam partai politik jarang sekali membawa nama Bakumpai secara politis, namun untuk mendukung suara biasanya mereka menjaring dengan pola identitas politik, dengan menyebutkan mereka adalah Suku Bakumpai. Oleh sebab itu, identitas politik tidak bisa dilepaskan begitu saja oleh mereka elit politik partai.

Agak bertolak belakang dengan sikap warga kebanyakan. Warga Bakumpai pada awalnya agak acuh dengan isu-isu politik identitas (suku, agama, dan ras), saat ini suka tidak suka *tren Ahok* (Pilkada Jakarta) masuk ke celah-celah dinding rumah warga Bakumpai, hingga setidaknya mereka

sudah mempersiapkan diri mereka dengan menggalang kekuatan melalui partai-partai politik seperti diungkapkan oleh YA (nama samaran), Ketua Umum Pusat Organisasi Kerukunan Keluarga Bakumpai mengatakan *“selama beberapa periode Pilkada, saya merasa bersalah karena belum maksimal mendukung calon orang Bakumpai, kita melepas saja warga Bakumpai yang berkompetisi menjadi Pimpinan daerah, dan saya juga agak prihatin karena beberapa calon kita berjatuhun gagal dalam kompetisi menjadi Kepala Daerah seperti Murung Raya dan Katingan, insha Allah di masa akan datang kita akan mempersiapkan diri untuk mengikuti pesta suksesi kepemimpinan daerah”* ujarnya.

Sama halnya yang diungkapkan oleh SR (nama samaran) ketua umum KKB pusat, mengatakan bahwa sikap warga Bakumpai dalam hal ini kesiapan calon yang akan diusung parpol juga menjadi pertimbangan seperti jumlah calon *“Ampu e uluh Bakumpai handak uras jadi Bupati, makanya uras mancalon, sampai dua atau telo calon di Bakumpai, oleh te suara jadi positi jida ije, makanya Calon itah si Katingan kalah (kelihatannya orang Bakumpai semua ingin menjadi Bupati, maka semua mencalon, sampai dua atau tiga calon, makanya calon kita di salah satu kabupaten mengalami kekalahan)”* kata SR (nama samaran), Ketua KKB Kalimantan Tengah. *“Demikian pula dengan salah satu kabupaten, calon itah ada dua pasang, ya nyata beh kalah, karena suara jida jadi ije”* (demikian pula dengan salah satu kabupaten, calon kita ada dua pasang, ya nyata kalah, karena suara tidak menjadi satu).

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas dalam menghadapi Pilkada serentak warga Bakumpai belum mempersiapkan calon sendiri, dan mempersiapkan diri untuk memenangkan kontestasi politik. Hal ini politikus Bakumpai dibiarkan tumbuh alami secara mandiri, tidak terpolakan dan terstruktur hingga penataan calon masih melalui jalur perseorangan serta warga Bakumpai sendiri belum solid dalam mengusung calon dari warga Bakumpai sendiri.

Pemahaman tentang identitas politik di kalangan masyarakat dayak Bakumpai memang beragam, tetapi dari keragaman itu dapat ditarik sebuah kesimpulan Bakumpai lebih *interest* pada aspek yang lain seperti pendidikan dengan profesi sebagai guru dan dosen, dagang, dan sebagai abdi negara (ASN). Selain masyarakat, juga perlu kiranya melihat

bagaimana pandangan atau sikap para generasi muda tentang identitas politik tersebut.

E. SIKAP PEMILIH PEMULA SUKU BAKUMPAI

Pendidikan politik adalah cara bagaimana suatu bangsa mentransfer budaya politiknya dari generasi yang satu ke generasi kemudian.³⁵ Sedangkan budaya politik adalah keseluruhan nilai, keyakinan empirik, dan lambang ekspresif yang menentukan terciptanya situasi di tempat kegiatan politik terselenggara. Pendidikan politik sebagai proses penyampaian budaya politik bangsa, mencakup cita-cita politik maupun norma-norma operasional dari sistem organisasi politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Pendidikan politik perlu ditingkatkan sebagai kesadaran dalam berpolitik akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga siswa diharapkan ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan.

Sebagai pemilih pemula dalam Pemilu, siswa atau remaja pada umumnya memiliki suatu sistem sosial yang seolah-olah menggambarkan bahwa mereka mempunyai *gairah* (semangat). Perilaku remaja yang santai, bebas, dan cenderung pada hal-hal yang informal dan mencari kesenangan, biasanya tidak terlalu senang dengan pola-pola orang dewasa apalagi politik praktis. Pada dasarnya, seorang remaja membutuhkan dukungan dan konsensus dari kelompok sebayanya. Dalam hal ini setiap penyimpangan nilai dan norma kelompok akan mendapat celaan dari kelompoknya, karena hubungan antara remaja dan kelompoknya bersifat solider dan setia kawan. Pada umumnya, para remaja atas kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan persamaan dalam minat, kesenangan, atau faktor lain.

Karakteristik tata aturan Pilkada Daerah, di dalam undang-undang 32 tahun 2004 bahwa Pemilih Pemula adalah usia dimulai umur 17 tahun, artinya masa usia ini adalah masa remaja siswa Kelas XI SLTA dan Peraturan KPU No.10 Tahun 2018 bahwa Penyelenggara Pemilu (KPU)

³⁵ P Panggabean, *Political Education and Nation Cadreation* (Jakarta: Sinar Harapan,

1994), 34.

wajib mensosialisasikan Pemilihan Umum baik Pilkada, Pileg, maupun Pilpres berikut tahap-tahapannya serta ketentuan sanksi dan sengketa Pilkada.

1) Sikap Pemilih Pemula di Kabupaten Katingan

Kepala Madrasah Aliyah AS (nama samaran) yang ditemui dalam penelitian ini mengatakan *“Saya membebaskan siswa untuk memilih sesuai aspirasinya, namun banyak juga siswa yang memilih sesuai dengan arahan orang tuanya, seperti suara orang Bakumpai pecah karena ada dua Paslon dari Bakumpai yang sama-sama kuat, yaitu Pak Surya adalah Sosok yang sudah berpengalaman dan sudah pernah menjadi Wakil Bupati semasa Bupati Duwel Rawing dan Pak Fahmi adalah sosok muda, yang masih energik dan penuh semangat”*.

Menurut MY (nama samaran), Paslon yang kuat dipilih oleh orang Bakumpai adalah HS (nama samaran) karena mayoritas penduduk di Samba Bakumpai adalah keluarga atau kerabat beliau *“Di Samba Bakumpai mayoritas memilih pak HS karena mayoritas di Samba Bakumpai adalah keluarga beliau”*.

Bagaimana dengan pemilih Pemula, MY sulit menjawabnya karena dilihat dari perolehan suara di Samba Bakumpai SK (nama samaran), FH (nama samaran) kalah telak dan pemenangnya adalah HS. *“Di sini (di Samba Bakumpai) pemenangnya adalah HS hanya sedikit yg memilih FH dan SK”*.

Ke mana pilihan orang muda di Samba Bakumpai *“ Saya memilih orang muda”* Kata FS (salah satu siswa) kelas XII MA, alasannya adalah



Gambar 9. Wawancara dengan para siswa di sekolah

“Orang muda memiliki semangat membangun yang lebih dari pada yang tua, meskipun memiliki pengalaman” Orang muda yang dimaksud adalah FH.

Hal senada disampaikan oleh SS (salah satu siswi) *“Iki Mamilih FH, karena iye uluh tabela masih semangat akan membangun lebu”* (kami memilih FH, karena beliau masih muda dan masih semangat untuk membangun daerah). Sebagaimana terlihat pada gambar 9 melakukan wawancara dengan para siswa dan guru di sekolah.

Kepala SMK-Muhammadiyah SL (nama samaran) kepala SMK-Muhammadiyah Tumbang Samba menyatakan bahwa ada beberapa siswa SMK Muhammaadiyah yang bersuku Bakumpai dan bagaimana pandangan SL tentang Pilkada serentak di Kecamatan Kahayan Tengah. Menurut SL Kepala SMK-Muhammadiyah mengatakan bahwa pemilih pemula yang ada di SMK Muhammadiyah sedikit anak yang bersuku Bakumpai, namun ia mengatakan bahwa semua guru membebaskan siswa untuk menggunakan haknya sebagai pemilih Pemula.

Upaya sosialisasi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Katingan Tengah beberapa kali datang ke sekolah untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan Pilkada serentak tahun 2018 *“Memang beberapa kali Panitia Pemilih berkunjung ke Sekolah kami dalam rangka sosialisasi Pilkada, dan diskusi hangat antara Panlih dengan siswa sekitar simulasi pencoblosan”*.

Ibu TW (nama samaran) guru SMK-Muhammadiyah Tumbang Samba. *“Saya wali kelas XI SMK Muhammadiyah dan di kelas saya ada separo kelas siswa bersuku Bakumpai, saya coba pancing mereka dengan paslon yang ada, ternyata mereka tidak memilih sesuku (Bakumpai) namun memilih seagama”* Seperti anak inisial M *“ Saya akan memilih pimpinan seagama, yaitu Islam dan pastinya yang bisa diteladani untuk membangun kampung”* berbeda dengan siswa yang berinisial SM mengatakan *“ Saya pilih pimpinan muda yang memiliki kinerja dan terbukti membangun daerah”*.

EY (nama samaran) guru SMA Muhammadiyah Tumbang Samba, EY, Guru Bahasa Inggris SMK-Muhammadiyah Tumbang Samba *“Saya wali kelas XII di mana ada beberapa siswa saya suku Bakumpai, saya minta untuk menunjukan pilihannya dia mengatakan “ hehe rahasia pak, nah saya memilih yang seiman saja”* Siswa yang lain menyatakan *“saya memilih pimpinan sesuai arahan Ayah saya”*.

2) Sikap Warga di Kabupaten Murung Raya

SY (nama samaran), Kepala sekolah SMAN-1 Murung, *“Saya bersama Guru di SMAN-1 Murung ini, tidak memberikan arahan ke mana pilihan siswa terutama siswa kelas XI dan Kelas XII, kita netral saja”*.

AB (nama samaran) tokoh muda Bakumpai di Briwit *“iki si Briwit tuh tatap mamilih uluh Bakumpai, handak kia mangkeme uluh itah jadi Bupati, namun kalah te kih maarit ai hindai 5 nyelu akan datang, mudahan panjang umur sampet kia uluh Bakumpai mamimpin lebung itah tu”* (kami di Briwit tetap memilih orang Bakumpai, ingin juga merasakan bagaimana orang kita yang jadi Bupati, namun kalah ya tidak apa, 5 tahun lagi merasakan dipimpin oleh orang lain, mudahan panjang umur dan sempat merasakan orang Bakumpai jadi pemimpin daerah kita ini).

Penelitian ini melakukan wawancara dengan beberapa siswa SMAN-1 Murung di Bahitom yang bersuku Bakumpai di antaranya adalah SY (nama samaran) siswa Kelas XII SMAN 1 Murung *“Uluh mamilih uluh Bakumpai beh, tagal kalah sayang e pang, peteh apa uluh ji imilih adalah uluh Bakumpai ela mamilih ji beken”* (Saya memilih orang Bakumpai saja, tetapi kalah sayang sekali, pesan orang tua saya yang dipilih adalah orang Bakumpai jangan yang lain).

Demikian pula halnya LR (nama samaran) siswa kelas XI SMAN 1 Murung *“Inggih sama beh iki ji kahuma mamilih Calon uluh Bakumpai, dan jite peteh abah uluh ela mamilih ji beken”* (ya sama saja kami serumah memilih



Gambar 10. Kantor KPU Kabupaten Murung Raya

calon orang Bakumpai, dan itu adalah pesan Ayah saya, jangan memilih yang lain). AF (nama samaran) siswa kelas XI SMAN -1 Murung *“Kalo ulun jida maumba pilihan uluh bakas, inyuhu sidin pilih sesuai hati, dan atei ulun mamilih sesama muslim dan uluh Bakumpai, soal manang atau kalah jite urusan uluh are ji penting ulun jadi manumun perintah Allah dan RasulNya”* (Saya tidak mengikuti pilihan orang tua, orang tua meminta memilih sesuai hati dan hati ulun memilih sesama muslim dan orang Bakumpai, soal manang kalah itu urusan orang banyak yang penting saya sudah menunaikan perintah Allah dan Rasul-Nya).

HS (nama samaran) siswa Kelas XII SMAN-1 Murung *“Iki melai si Bahitom, dan ji manang si TPS iki adalah Calon uluh Bakumpai dan jite sesuai dengan kahandak iki uluh bakumpai”* (Kami diam di Desa Bahitom, dan yang menang di TPS kami adalah Calon orang Bakumpai dan itu sesuai dengan kehendak kami orang Bakumpai).

3) Sikap Warga di Kabupaten Barito Utara

Peneliti mengunjungi informan ke Muara Teweh tanggal 9 Agustus 2018 di antaranya adalah SY (nama samaran) Kasi Madrasah Kemenag Kab Barito Utara, seorang pejabat yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pembina pendidikan Madrasah. Wawancara dengan beliau di Kantor Kemenag Kab. Barito Utara *“Pemilih Pemula siswa Madrasah diserahkan kebijakannya kepada Kepala MAN”* kata SY (nama samaran), *“Memang beberapa kali kita diundang menghadiri Sosialisasi Pilkada serentak oleh KPU Barito Utara, baik ceramah, diskusi, hingga peragaan (simulasi)”*. Hal ini terlihat pada gambar 13 peneliti melakukan wawancara dengan beberapa stakeholder di Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara.

Beliau menampik jika dalam Pilkada ini ada pesan-pesan politik pada pemilih Pemula, baik oleh petahana maupun Paslon lainnya *“Alhamdulillah tidak ada pesanan sponsor dari Paslon manapun, sepertinya berjalan sesuai aturan aja”* tambah SY (nama samaran) ditanya tentang Politik Identitas. *“Menurut saya, Pak H.M. Nadalsyah sudah diprediksi akan menang kembali dan menjabat untuk periode kedua, yaitu 2018-2023, ya karena beliau orang Bakumpai dan memiliki kinerja yang bagus, serta semua komponen menghormati*

dan menginginkan beliau duduk menjabat kembali” katanya. H.M. Nadalsyah adalah sosok pemimpin yang memperhatikan rakyatnya, beliau adalah pengusaha



Gambar 11. Wawancara dengan beberapa stakeholder di lingkungan Kementerian Agama

yang sukses yang memiliki akses ekonomi yang luar biasa, hingga seperti yang dalam menjalankan roda pemerintahan sistem yang digunakan adalah sistem Perusahaan, di mana staf yang berprestasi akan diberi penghargaan dan yang belum berprestasi dipacu melalui pembinaan” ungkap Pak Syamsul tentang Profil H.M. Nadalsyah.

RF (nama samaran) Pengawas Madrasah Kemenag Kabupaten Barito Utara mengatakan “H. Koyem itu sangat terkenal anak uluan bi SD sampai SMA, sangat tau batangnya duit anak uluan, sampai kan bea siswa bi duit e kabuat, jida bi pemda jadi wajar beh anak uluan ji pemilih pemula te mamilih iye” (H. Koyem itu sangat dikenal oleh siswa SD sampai SMA, karena beliau suka memberi uang untuk anak, sampai memberikan beasiswa dari uangnya sendiri bukan dari Pemda, jadi sangat wajar anak-anak Pemilih Pemula memilih H.Koyem sebagai pemimpinnya).

HK (nama samaran) Pengawas SMA Barito Utara salah satu tokoh muda Bakumpai mengatakan “H. Koyem adalah sosok pemimpin yang disenangi oleh rakyatnya, jiwa sosial beliau sangat luar biasa, yang saya kagum beliau datang ke sekolah, bersapa ria sama siswa, malah beliau mau aja diajak senda gurau dengan siswa SMA seolah-olah Beliau bukan seorang Bupati tetapi sebagai seorang ayah yang dekat dengan anak-anaknya” Kata HK, “hingga tidak heran beliau memenangkan kontes elektabilitas di Barito Utara”.

Beberapa siswa SMAN 1 dan SMAN 2 yang diwawancarai dalam penelitian ini, semua menyatakan bahwa H.M. Nadalsyah adalah sosok ayah dan orang tua yang dapat memberikan harapan bagi mereka “*Pak H. Koyem banyak memiliki Perusahaan dari Sawit, Tambang Batu Bara, dan lain-lain, beliau berjanji jika tidak mau kuliah keluar daerah dan hanya kuliah di Muara Teweh, akan dipekerjakan di perusahaan beliau*” ungkap salah seorang siswa SMAN 2 Muara Teweh di Jingah.

F. SIKAP WARGA BAKUMPAI TERHADAP POLITIK IDENTITAS PADA PILKADA SERENTAK DI KALIMANTAN TENGAH

Di masa digitalisasi saat ini, informasi baik fakta maupun fiksi dapat diakses kapan dan di mana saja. Demikian pula informasi tentang proses suksesi sangat memberikan nuansa baru bagi masyarakat. Masyarakat yang dulunya hanya sebagai penerima pasif (*passive receiver*) tidak memiliki aksi karena hanya dikonsumsi sebagai informasi biasa, namun akan berbeda jika menjadi penerima aktif hingga bisa membekas dalam sikap dan pikiran. Menurut Gerard Shoning dan James Anderson, melihat isi media sebagai sesuatu media yang interaktif, di mana makna yang dilahirkan akan sama dengan kelompok yang menerima informasi (Anderson dalam Littejohn, 1996: 332-333). Demikian pula dengan warga Bakumpai yang saat ini media informatika sudah sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018, isu politik identitas diangkat oleh sebagian kalangan. Beberapa tokoh trauma dengan Pilkada DKI Jakarta kemarin. Menurut mereka, politik identitas memicu konflik. Karena itu, mereka menentang dan berupaya mencegah politik identitas terulang di Pilkada daerah lain tahun 2018. Tapi benarkah politik identitas memicu konflik? Untuk menjawabnya, kita perlu tahu lebih dulu, seperti apa politik identitas yang mereka maksud? Kalau yang dimaksud adalah politik yang menggunakan isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), maka seperti apa bentuknya? Apakah bentuknya seperti sikap seorang Muslim yang tidak memilih pemimpin non-Muslim karena larangan agamanya? Atau seperti dakwah seorang ulama yang menyampaikan ayat larangan memilih pemimpin non-Muslim kepada

jamaahnya? Kalau ini yang dimaksud, tampaknya itu tidak menyebabkan konflik di Pilkada DKI kemarin. Kelompok umat agama lain tak terlihat ada yang marah, protes, demo, ribut dengan umat Islam karena hal itu. Antar mereka rukun-rukun saja. Artinya perbedaan identitas tak perlu menyebabkan permusuhan.

Bagi umat Islam, tidak memilih pemimpin non-Muslim dan mendakwahkan ayat larangan memilih pemimpin non-Muslim kepada Muslim juga tentunya, selain merupakan ajaran agama, juga haknya yang dijamin dan dilindungi oleh pasal 29 UUD 1945. Artinya, tidak bertentangan dengan konstitusi. Juga bukan bentuk intoleransi. Arti toleransi menurut Tokoh NU KH. Saifuddin Zuhri dalam Panji Masyarakat 15/10/1978, adalah menenggang orang lain, tanpa mengorbankan prinsip.

Gempuran informasi politik identitas pada pelaksanaan Pilkada di setiap daerah, seperti DKI dan daerah lainnya sepertinya akan membekas di titik pandang warga Bakumpai terhadap Politik, seperti diungkapkan oleh Pak SY, seorang tokoh Bakumpai Tumbang Samba yang aktif di partai politik ber lambang beringin Golkar menyatakan “ *Politik Identitas adalah komoditas Elit Politik untuk mendulang suara elektabilitas, tidak kita pungkiri bahwa sampai saat ini dan kita rasakan bahwa Politik Identitas masih sangat kental dimainkan oleh Elit Politik.*”

Hal senada dengan SY (nama samaran) disampaikan oleh ST (nama samaran), Ketua Bawaslu Kalimantan Tengah, “ *tidak bisa kita pungkiri bahwa Politik Identitas masih dipakai oleh Politik, Tokoh Agama, dan simpatisan Politik secara massif dalam rangka menarik suara pemilih, dan saya melihat kemasan Politik Identitas masih bagus dan rapi tidak mengarah pada pelanggaran Undang-Undang Pemilu.*” Menurut beliau, “ *Ya sah-sah saja seorang pemuka agama memberikan tausiah pada umatnya agar memilih seiman dan itu bukan pelanggaran, seperti beberapa video youtube di Jakarta ada Pendeta menyatakan Hayo Pilih Pimpinan seiman karena itu perintah Tuhan, dan ini bukan pelanggaran hukum pemilu karena disampaikan pada komunitas sendiri dan tidak ada pemaksaan*” katanya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Murung Raya MA (nama samaran), memandang “ *Politik Identitas tidak bisa kita hindari dan ini adalah karakter politisi dalam mencari dukungan, dan tidak saja pada satu isu politik*”

identitas saja namun sangat beragam, misalnya politis datang ke kelompok Pedagang, dia menyatakan dirinya adalah Pedagang dan jika ia terpilih dia akan



Gambar 12. Wawancara dengan salah satu tokoh agama di Kabupaten Murung Raya

sangat peduli dengan pedagang, pada komunitas lain dia juga begitu, tidak lepas dari calon Orang Bakumpai, dia (politisi) datang di komunitas warga Bakumpai dia mengatakan “Yaku Uluh Itah Bakumpai dan jika aku karek manang, maka aku akan memperhatikan warga Bakumpai, jadi menurut saya Politik Identitas tidak bisa dikikis sedemikian rupa karena dia mengangkat hakiki manusia” (Wawancara dengan Ketua MUI Murung Raya sebagaimana terlihat pada gambar 12.

Menurut beliau, politik identitas masih digunakan oleh elit-elit partai seperti isu keagamaan, suku, kedaerahan, bahkan salah satu partai juga mengangkat isu kedaerahan dalam rangka menarik pemilih. Di Barito Utara, seperti yang menonjol adalah isu keagamaan “rata-rata, kalau ulun memperhatikan di sini ni orang PDIP tu karena PDIP tu identik dengan non padahal kan Taufik islam, tapi partainya orang banyak kada suka.

Bagaimana pandangan GH (nama samaran) selaku Ketua MUI tentang gesekan dalam Pilkada antara Muslim dan non-Muslim “Alhamdulillah di Barito Utara tidak ada gesekan-gesekan antara Muslim dan non-Muslim, karena FKUB sangat aktif dalam memberikan arahan dan mengawal toleransi umat beragama di Barito Utara, dan Pak H.M.Nadalsyah selama menjabat 5 tahun memang sangat berlaku adil bagi non-Muslim meskipun secara proporsional sesuai jumlah penduduknya, jika di kampung itu banyak Kristen Protestan, maka beliau bantu membangun Gereja, demikian pula dengan perkampungan orang Dayak sangat mendapat perhatian beliau. Meskipun pada beberapa bulan ini hubungan antara pendukung Pertahana dan lawan politiknya agak memanas karena mayoritas pendukung lawan politik H.M. Nadalsyah adalah mayoritas



Gambar 13. Wawancara dengan tokoh agama Ketua Majelis Ulama Kabupaten Barito Utara

non-Muslim, namun itu hanya sebagian kecil saja di sekeliling timeses saja, namun secara umum non-Muslim di Barito Utara juga pendukung fanatik Pak H.Koyem. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini sebagaimana terlihat pada gambar 13 berikut ini:

Bagaimana kalangan elit warga Bakumpai dalam memandang politik identitas, berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat dan politisi Bakumpai tergambar dalam wawancara mendalam dalam penelitian ini.

1. Bapak SJ (nama samaran), seorang Guru dan Kepala Sekolah Dasar warga Bakumpai di Samba Bakumpai, *"Insha Allah iki mamilih pertama*



Gambar 14. Wawancara dengan guru dan kepsek SD Samba Bakumpai

Muslim atau ije agama, kadue adalah uluh Bakumpai” (Insha Allah kami memilih pertama Muslim atau satu agama kedua adalah Suku Bakumpai” (Masjid Ash Shalihin, Rabu, 5 Juli 2018, pukul 10: 02 WIB). “Karena memilih calon pimpinan muslim hukum e wajib, sesuai perintah Agama Islam, sesuai QS. Al Maidah ayat 51”. Menurut Pak Sujai, warga Bakumpai di Samba Bakumpai masih belum mau berpartisipasi secara total pada Pilkada serentak kali ini, meskipun Calon Bupati dan wakil Bupati ada dua pasangan yang ikut kontestan”.

2. Pak JH (nama samaran), adalah tokoh masyarakat Bakumpai Desa Samba Bakumpai “Kami adalah keluarga Pak Surya, sedikit kecewa dengan beliau mengapa memilih calon Wakil orang lain dan anaknda tahu, orang Bakumpai sedikit banyaknya agak fanatik lawan agamanya, oleh sebab itu banyak nang kada umpat mamilih, lebih baik mamantat baulihi duit”. Menurut Pak Johansyah wajar warga kecewa karena saking handaknya pemimpin itu bulat orang Islam” katanya. Hal ini selaras apa yang diungkapkan oleh Pak Suja’i, “di sini itu pa, di TPS berapa yang sekian persen yang memilih kami TPS 1 80 % pemilih, TPS 2 kada salah 50% ja lah, TPS 3 tu nah yang paling sadikit yang datang kada sampai 30% persen bisa sampai 40%, aku jar buhannya TPS 1 masih lumayan 80% yang memilih ada satu TPS yang kada memenuhi di daerah Bakumpai ni tu ada yang kada mencapai 50% tu nah (di sini itu pak di beberapa TPS hanya sekian persen yang memilih, TPS



Gambar 15. Wawancara dengan salah satu masyarakat Samba Bakumpai

1 80 % pemilih, TPS 2 jika tidak salah 50% aja, TPS 3 yang paling sedikit kada sampai 30% atau 40%, kalo di TPS 1 masih lumayan 80% namun ada salah satu TPS di Samba Bakumpai tidak sampai 50%).

3. Pak MJ (nama samaran), warga RT 3 “Waktu Pilkada kami bausaha mamutik durian, kami manjaga pohon durian mekeh nakau uluh, sabab wayah tuh bamaling, dari pada uluh maimpung bua duhian keleh injaga, makanya iki are jida mancoblos, belah e ye maimpung duhian, ada ji manurih gita atau mamantat, ada ji malauk, dan iki jadi katawan hasil pilkada te pasti Fahmi dan Pak H.Surya kalah, narai gana e karena uras handak jadi bupati, padahal sala strategi e. Jaka Pak Surya kabuat atau Fahmi kabuat, pasti Sakarias te kalah, nah jite ji iki jida umba mancoblos (waktu pilkada kemaren, kami berusaha memetik panen buah durian, kami menjaga pohon durian karena banyak maling dan dicuri orang. Kami menjaga jatuhnya buah durian dan lebih baik dijaga sendiri, makanya kami tidak ikut mencoblos. Sebagian warga lagi di samping ikut panen durian, mereka menyadap karet atau mencari ikan. Dan kami sudah tahu hasilnya bahwa pasti FH lawan SY kalah, apa gara-gara karena semua hendak jadi Bupati, padahal salah strategi. Jika Pak Surya sendiri atau Fahmi sendiri pasti Sakarias kalah, nah inilah alasan kami tidak ikut mencoblos.
4. Pak IH (nama samaran), salah seorang tokoh Bakumpai di Samba Katung dan masih keluarga dengan Paslon Fahmi “Nah tuh ken lah, yaku



Gambar 16. Wawancara dengan kepek dan ketua TPS 01 Desa Samba Bakumpai

tuh amang e Fahmi, dan H. Surya te hagian yaku dengai e, ye kadadue e uluh pintar, H.Surya te uluh Golkar jadi piji jadi Wabub jaman Duwel Rawing, nah Fahmi tuh iye kia, sabujur e iki te bangga dengan due tokoh jituh, ye Cuma karena uras handak jadi pemimpin ye apaboleh buat, erwen maju badadue, padahal basaing amang dengan aken e kia. Nah jituhlah ji ma'wi uluh lebu ada kecewa, buhen jida maju ije beh dan bakalah ije e, hehehe tapi jitelah politik. Akhir e itah katawan bahwa kadadue e kalah dan ji manang Sakarias ji uluh Tumbang Samba tuh kia pang" ujar beliau mengawali wawancara dalam penelitian ini.

5. ER (nama samaran), Sekretaris Umum Kerukunan Keluarga Bakumpai Kab. Katingan menyebutkan "Politik Identitas tidak bisa kita hindari, karena warga kita belum memiliki nuansa demokratis yang mendalam, hal ini karena warga Bakumpai adalah masyarakat religius dan sangat kental dengan keislamannya. Oleh sebab itu, pola Politik Identitas dimainkan oleh elit politik untuk mencari dukungan, jadi bukan saja pada Pilkada Bupati, Gubernur, dan Presiden, setiap lini kehidupan masyarakat yang memiliki struktur stratanya akan menggunakan pola Politik Identitas dalam rangka mewujudkan ide, gagasan elit warganya". Mantan Anggota DPRD Kab. Katingan ini menyatakan sependapat dengan para elit politik bahwa sampai saat ini Politik Identitas masih menjadi nuansa dalam rangka menghalang elektabilitas



Gambar 17. Foto bersama setelah melakukan wawancara



Gambar 18. Wawancara dengan ER

6. Salah satu Tokoh Bakumpai mantan Wakil Bupati Murung Raya pak NY (nama samaran) mengungkapkan bahwa politik identitas masih sangat perlu untuk menggalang dukungan. *"Dalam pilkada di Murung Raya, mana politik yang menonjol lebih banyak politik identitas ke isu agama. Sedangkan isu masalah suku tidak terdengar karena calon pasangan mengakomodasi suku Bakumpai, yakni Bapak Rojikinor (bersuku Bakumpai dan Adik kandung Nuryah) mendampingi Drs. Perdie (Kristen, calon Bupati 2013-2023). Memang semua keluarga kami menerima pencalonan Rojikinor, tapi saya tidak setuju, karena Saya kecewa dengan janji-janji Willy (Mantan Bupati Mura sebelumnya) yang mulanya mendukung Saya untuk menjadi calon Bupati 2013-2018, tapi kenyataannya Willy mendukung adik kandungnya yang bernama Perdie. Kami juga mempunyai Tim Survey bahwa pasangan kami lah yang unggul, tapi karena faktor x (money Politic) akhirnya kami kalah. Dan kami kecewa dengan keluarga Willy"* (wawancara, Jumat, 7 September 2018). Menurut Pak NY (nama samaran), bahwa yang melatarbelakangi terjadinya politik identitas adalah faktor kesamaan agama *"Faktor yang melatarbelakangi lebih banyak ke faktor kesamaan agama dan adanya rasa ketidakadilan bantuan sosial keagamaan. Tapi karena Pilkada Mura 2018, Perdie dan Rojikinor didukung juga oleh partai yang benuansa Islam seperti PPP dan PKB dan sukarelawanannya juga banyak dari muslim, maka akhirnya Pasangan Perdie Rojikinor menang.*

7. Hal senada diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Kalimantan Tengah ST (nama samaran) beliau melihat *politik identitas* adalah dari *kacamata komunitas agama, budaya, dan kekerabatan* masih bernuansa positif, asal tidak menjadikan isu Politik Identitas untuk membunuh karakter pasangan calon yang lain yang disebut *black Company*, namun jika menyebut kelemahan-kelemahan yang berekses membangun itu boleh-boleh saja.
8. Demikian juga diungkapkan oleh Pak SY (nama samaran), beliau melihatnya politik identitas ada positif dan ada negatif, “Positifnya adalah jika salah satu komunitas agama atau suku mengusung calonnya yang baik, handal berjiwa pemimpin dan telah teruji kapabilitasnya itu malah bisa positif, cuma negatifnya juga ada biasanya minoritas tidak memiliki peluang untuk menjadi Penguasa”.
9. BD (nama samaran), Tokoh Bakumpai Desa Briwit Murung Raya, mengatakan bahwa “Memilih Pimpinan Muslim wajib hukum e ken ai, dan haram memilih uluh non-Muslim sabu jar e adeh beh uluh Bakumpai kah uluh Banjar kah asal iye Muslim pasti imilih iki, nana hindai uluh Bakumpai (Memilih Pemimpin muslim itu wajib hukumnya dan haram memilih orang non-Muslim, sebenarnya siapa saja asal muslim pasti dipilih, orang Bakumpai kah orang Banjar kah asal inya muslim pasti dipilih, apalagi orang Bakumpai) (Puruk Cahu Seberang, Rabu, 8 Agustus 2018. Pukul 09.36).



Gambar 19. Wawancara dengan SY



Gambar 20. Wawancara dengan BD

10. Salah satu tokoh Agama Islam Ketua MUI Kabupaten Murung Raya Pak MA (nama samaran), Ketua MUI Kab. Murung Raya mengatakan *“ Politik Identitas jika kesukuan, kekerabatan belum nampak menonjol, namun yang menonjol adalah pada sentimen keagamaan. Hal ini wajar karena umat Islam sudah mulai sadar atas posisi mereka saat ini sebagai mayoritas, namun disayangkan masih kalah dengan strategi faktor X karena mayoritas umat Islam masih banyak di bawah garis kemiskinan jadi masih bisa dipengaruhi oleh faktor money politic, meskipun demikian sangat sulit membuktikan adanya money politic, karena dibungkus dengan program yang terstruktur, jadi secara kasat mata tidak nampak adanya kasus money politic, hingga secara pragmatis calon yang diusung berdasarkan sentiment agama selalu kalah”*.
11. IH (nama samaran), Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Murung Raya dan tokoh muda Bakumpai, mengatakan *“Sikap Warga Bakumpai sebenarnya jika kesukuan tidak terlalu kentara, namun yang menonjol adalah mengarah pada sentimen agama, di samping paslon yang menghembuskan isu Politik Identitas sebagai upaya mendulang suara juga sikap warga Bakumpai yang memiliki fanatik agama yang cukup kuat”*.
12. Mantan Wakil Bupati Murung Raya, Pak DR (nama samaran) juga menyatakan bahwa politik identitas di Murung Raya yang dia amati mengarah pada sentimen agama, hal ini warga terinspirasi



Gambar 21. Wawancara dengan Ketua MUI Murung Raya

hebohnya Pilkada DKI. Namun kekalahan Paslon warga Kakumpai karena memang masing-masing Paslon ingin maju sendiri-sendiri seperti beliau ungkapkan, calon empat enam calon independen, telu si hite uluh bakumpai, independen te pa sapitani dengan H. Hasbi bekumpai Cuma ikau te kan memang calon ji di siapkan, jadi ulun I insek sugianto pa gubernur kenapa pa wabub kada maju ah mun ulun



Gambar 22. Wawancara dengan IH



Gambar 23. Wawancara dengan Mantan Wakil Bupati Mura

maju pa ae empat calon, 3 Islam, 1 Ahu dari buhannya (calon ada 4 pasang da nada calon independen, tiga paslon semua orang Bakumpai dan salah satunya adalah Pak Sapuani berpasangan dengan H. Hasbi yang memang sudah disiapkan, saya ditanya Pak Gubernur Sugianto mengapa tidak maju, saya katakan jika saya maju, maka akan ada 4 pasang dari Bakumpai, dan pasti kalah dengan mereka yang hanya 1 Paslon).

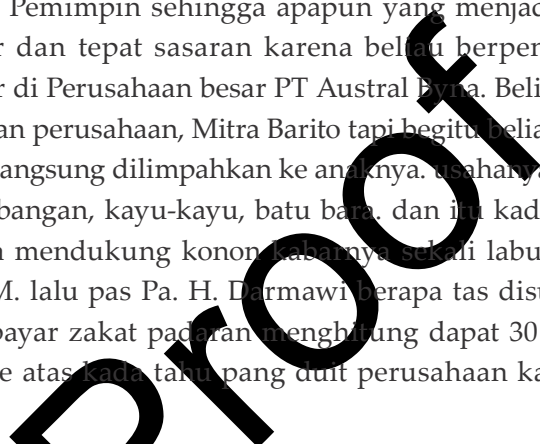
13. TI (nama samaran), Kepala Kemenag Kabupaten Barito Utara ditanya tentang sikap warga Bakumpai Barito Utara terhadap politik identitas mengatakan "Saya kira begini, Pilkada itu sebenarnya adalah pesta demokrasi, dan semua warga Negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih secara bebas dan rahasia, meskipun demikian sistem demokrasi juga memiliki celah sebagai jalur pragmatis normatif, nah jalur itu disebut Politik Identitas yaitu pemilihan seorang pimpinan berdasarkan suku, agama, gender, dan kekerabatan, dan menurut saya selama hal ini tidak mengganggu kemaslahatan boleh-boleh saja. Untuk diketahui bahwa Politik Identitas itu dimanfaatkan oleh

elit politik partai dalam rangka mencari dukungan masyarakat. Yang tidak bisa kita toleransi adalah apabila ada kampanye hitam dengan

menjelekkan orang lain seolah-olah merekalah yang paling suci, paling baik, dan sebagainya, maka ini pun sangat dilarang dalam Islam. Tentang kemenangan H.M. Nadalsyah, Pak TI (nama samaran) menyatakan bahwa sangat wajar karena prestasi dan kinerja Pak H. Koyem memang sangat jelas dan nyata untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Barito Utara. Sebelum jadi bupati, Pak Nadalsyah memang sudah dikenal ketokohnya lalu dilakukan orang karena ijazahnya paket C dan dengan kesaksian kawan-kawan bahwa inya pernah bersumpah pernah di SMA cuma kada tuntung lawan orangnya merakyat dan sosialnya luar biasa jadi ketokohnya, kepopularitasnya, dengan jiwa membangun lawan kedekatannya dengan tokoh dan umat. Nah sehingga besarnya itu walaupun beliau itu tokoh-tokoh bakumpai jadi tambah jadi gitu tadinya beliau memang sosial senang menolong dan itu memang terbukti 4 tahun pas safari Ramadhan kada suah sidin itu yang kada memberi 50 juta 1 masjid atau langgar pas puasa tadi jadi memang pertama orangnya sugih bedahulu karena orang perusahaan-perusahaan kan dan sidin berkali-kali berucap “aku kada becari aku hendak membangun barito” lalu prediksi orang sidin itu sebenarnya nyaris melawan kotak kosong, taufik itu kan sebenarnya kada hendak maju mungkin pesan dari cabang jakanya memang dari kalangan ini kan cepat jadi kelemahannya lain putra daerah jadi banyak sisi kelebihan beliau dari sisi pemerintahan walaupun lulusan hanya paket C, sisi politik kada asli orang politik hanya saja beliau bergabung ternyata keseriusan beliau dan kelebihan beliau peringatan jadi pidatonya sekali ditegur orang “bujur, bagus, kada salah” walaupun hanya modal paket C ternyata sidin melebihi S2 berpendidikan artinya sisi keilmuan andaikan itu dipasangkan pun masalah sebenarnya kemenangan beliau itu sudah di prediksi menang karena hasil pembangunan memang terasa dari segi sosial, keagamaan, pemerintahan, perkantoran, keumatan dan bukti yang nyata banar ketika pemerintahan 3 tahun kemudian ketika beliau masuk dibenahi tahun tahun ke dua WTB, ke tiga WTB sampai masuk tahun ini itu luar biasa dan itu bukan hal yang mudah yang tadinya

rusak kerangka keuangan ketika beliau masuk bagus mungkin karena manajemen sidin dan lawan jua biasa menghadapi orang termasuk

Pemimpin sehingga apapun yang menjadi
dan tepat sasaran karena beliau berpe
di Perusahaan besar PT Austral Hynd. Beliau
an perusahaan, Mitra Barito tapi begitu beliau
langsung dilimpahkan ke anaknya. usahanya
bangan, kayu-kayu, batu bara, dan itu kad
mendukung konon kabarnya sekali labu
M. lalu pas Pa. H. Darmawi berapa tas dis
ayar zakat padaran menghilung dapat 30
e atas kada tahu pang duit perusahaan ka



Pemimpin sehingga apapun yang menjadi
dan tepat sasaran karena beliau berpe
di Perusahaan besar PT Austral Hynd. Beliau
an perusahaan, Mitra Barito tapi begitu beliau
langsung dilimpahkan ke anaknya. usahanya
bangan, kayu-kayu, batu bara, dan itu kad
mendukung konon kabarnya sekali labu
M. lalu pas Pa. H. Darmawi berapa tas dis
ayar zakat padaran menghilung dapat 30
e atas kada tahu pang duit perusahaan ka

keuntungan kah. dan sosialnya memang termasuk mobil avanza ini kan kakandepag yang ke-9 kada suah tersentuh. Orangnya termasuk madrasah kita dibantu sidin, sosialnya, ada kedekatan walaupun kada terlibat langsung dengan tim sukses sidin cuman beliau minta doa dengan kakandepag. "beliau tetap posisi nasionalisme semua. Misalnya dengan Pa Taufik kada usah lewat habang. Ibaratnya beliau itu di pasangken dengan botol kosong lawan orang kada karuan jadi banyak prediksi orang. Lalu itu yang disayangkan orang. cuman ya itu kan sidin mencari pasangan yang kada terlalu pintar lalu dimata orang islam inya kada terlalu fanatik ada safari umpat safari dan selalu datang ada bebuhan dinas kalau safari inya kada mau jika islam-islam sidin tetap jadi cuman sidin kada mau sidin handak menjaga. Kalau dimata semua umat beragama termasuk hindu-kaharingan justru mendukung sidin."

14. Ibu RR (nama samaran), Pimpinan Al.Hidayah, "Terus terang kemenangan Pak H.M.Nadalsyah adalah kemenangan masyarakat Kabupaten Barito Utara, karena beliau adalah sosok pimpinan yang tahu kepentingan rakyatnya".



Gambar 25. Wawancara dengan Ibu RR

15. BY (nama samaran), seorang tokoh masyarakat Muara Teweh, Pengurus Masjid Al-Hidayah Dermaga Muara Teweh mengungkapkan bahwa kemenangan H.Nadalsyah itu bukan karena politik identitas namun karena memang kinerja pertahanan yang dirasakan oleh masyarakat Barito Utara selama lima tahun ini, wawancara di tempat kediaman beliau, Kamis 9 Agustus 2018, jam 19:12 WIB. Kemenangan H.M.Nadalsyah memang sudah diprediksi masyarakat karena menurut H.M.Basyir *"Jadi visi misinya itu bagus jua pang pulang anu memang handak mebangun barito utara, dari pada ampun herbi taufik itu hendak meulah jembatan jar di karang jawa sana, limbas itu hendak membangun pabrik gatah, lalu kada cocok lagi, kada mudahan meningkat anu jar harga gatah, kada mun H. Koyem ni sudah beberapa tahun membantu anu jalan ke desa-desa sudah terhubung semuanya bilang stnby ja anunya tu alat-alat berat anggihnya di kecamatan-kecamatan tu mana ada keluhan masyarakat minta olah akan inya ulah akan, tu nang jadi inya menang"*. Selanjutnya kata Pak H.M. Basyir *"H. Nadalsyah Pander pander sebelumnya inya ni mula bagus pang kedesa-desa membantu dan inya kada bisa mengaramput, nang kaya masjid-masjid langgar nang kaya di Lampung apa yang diminta orang dikabulkannya, segala apa yang di minta orang diantaranya langsung ka lokasi"* Koyem atau H.M.Nadalsyah itu memang sangat pemurah meskipun daerah itu tidak memilih dia tetap dia bantu sebagaimana mestinya *"kada sudah lawas itu menggalangnya itu, dan inya tu kada bisa sarik jua mun orang belok. Mun H. Koyem mula di sedekahkannya apa yang di bari meskipun kalah di situ kada cagar di ambilnya lagi"*. Sosok H.Koyem adalah sosok membangun tanpa aling-alang, tanpa proposal jika ada permohonan masyarakat mau membangun masjid atau langgar, beliau langsung perintahkan anak buah perusahaannya untuk mengerjakan apa yang diminta oleh masyarakat, dan itu bukan uang APBD namun uang pribadi *"cagar kampanye ni sudah empat buah masjid yang di bangun lawan tanah-tanahnya di tukar pokoknya sudah ada tanahnya lah kadada jar buhan masyarakat, bah yang mana hendak di anu lokasinya rencana sudah dibayarilah, jar balum kena membayarnya langsung segala pasirnya datang batanya situ datang. Harau lahei sebuah, benangin sebuah, dimanakah yang*

*dua itu kada ingat. Langsung lawan tukang-tukangnya menggawinya, nah
lawan masjid jambu masjid darud taqwa itu inya jua". Ini salah satu Masjid*



Gambar 26. Wawancara dengan BY

bantuan pribadi H.M. Nadalsyah di desa Jambu. Sebagaimana diungkapkan oleh Kaspul Rahman, Guru Madrasah Ibtidaiyah Swasta di kampung Jambu, “jauh sebelum pilkada H. Koyem membangun masjid ini dengan biaya pribadi, dan sekali-sekali beliau datang kesini untuk sholat jumat bersama Jamaah kampung Jambu, padahal Kampung Jambu ini adalah tempat kelahiran Pak Taufiq lawan Politikanya Pak H.Nadalsyah”.

16. HG (nama samaran) Ketua MUI Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh pada tgl 09 Agustus 2018 pukul 15.58 WIB. Menurut beliau, politik identitas masih digunakan oleh elit-elit partai seperti isu keagamaan, suku, kedaerahan, bahkan salah satu partai juga mengangkat isu kedaerahan dalam rangka menarik pemilih. Di Barito Utara sepertinya yang menonjol adalah isu keagamaan “rata-rata, kalau ulun memperhatikan disini ni orang PDIP tu karena PDIP tu identik dengan non padahal kan taufik islam tapi partainya orang banyak kada suka. “Alhamdulillah di Barito Utara tidak ada gesekan-gesekan antara Muslim dan Non Muslim, karena FKUB sangat aktif dalam memberikan arahan dan mengawal toleransi umat beragama di Barito Utara, dan Pak H.M. Nadalsyah selama menjabat 5 tahun memang sangat berlaku adil bagi non muslim meskipun secara proporsional sesuai jumlah penduduknya, jika dikampung

itu banyak Kristen Protestan maka beliau bantu membangun Gereja, demikian pula dengan perkampungan orang Dayak sangat mendapat perhatian beliau. Meskipun pada beberapa bulan ini hubungan antara pendukung pertahanan dan lawan politiknya agak memanas, karena mayoritas pendukung lawan politik H.M. Nadalsyah adalah mayoritas non muslim, namun itu hanya sebagian kecil saja di sekeliling timses saja namun secara umum non muslim di Barito Utara juga pendukung fanatik Pak H.Koyem.

G. POLITIK IDENTITAS YANG MENONJOL DI KALIMANTAN TENGAH

Sebagian besar informan memberikan jawaban bahwa politik identitas yang paling menonjol adalah politik identitas agama, dibandingkan politik identitas kesukuan dan putra asli daerah. Sedangkan identitas kesukuan Bakumpai tidak tampak karena masing-masing calon Bupati sudah mengakomodir memasukkan suku-suku Bakumpai, bahkan di antara para calon tersebut mempunyai hubungan keluarga yang cukup dekat. Hal ini diungkapkan oleh H. Surya (Calon Bupati Katingan 2018-2023).

Ungkapan-ungkapan mengarah pada politik identitas dengan sentimen agama hampir di setiap kunjungan peneliti ke informan seperti di Katingan Tengah Kabupaten Katingan, di Desa Briwit, Bahito dan Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya, di Desa Jambu, Jingah, Lanjas, bahkan mereka menyebut haram memilih pimpinan selain orang Islam, dan memilih selain Islam masuk dalam kategori munafik.

Sebagian informan menjawab bahwa munculnya politik identitas ini disebabkan oleh rasa ketidakadilan dalam penganggaran bantuan keagamaan antara agama Kristen dan agama Islam. Lebih dari itu, terdapat rasa ketidakadilan dalam pembagian posisi jabatan dalam pemerintahan. Hal ini diungkapkan oleh MA (nama samaran) (Ketua MUI Murung Raya). Selain itu, rasa primordial sentimen agama Islam juga menjadi alasan timbulnya politik identitas. Lebih dari itu, ada pula disebabkan oleh informasi media sosial dari kewajiban seorang muslim memilih pemimpin yang muslim seperti kasus Ahok di Jakarta, sebagaimana disebutkan dalam al-Maidah ayat 51.

Bahkan di antara warga Bakumpai di Katingan ada pula yang tidak mau memilih alias golongan putih (golput) karena semua pasangan calon bupati dan wakil bupati Katingan yang berjumlah 5 pasang itu tidak ada satu pun yang muslim-muslim.

Sebagian besar informan memberikan tanggapan bahwa politik identitas itu melekat pada setiap orang, seperti agama dan suku. Oleh karena itu, tidak bisa dihilangkan. Identitas itu penting untuk dikenal oleh masyarakat. Itulah sebabnya mereka menilai dan berargumentasi bahwa politik identitas itu baik dan positif untuk kontestasi pilkada 2018. Bahkan salah satu tim Bawaslu Kalteng SS (nama samaran) mengatakan bahwa politik identitas tidak merusak demokrasi, nasionalisme, dan pluralisme, serta multikulturalisme. Namun, HS (nama samaran) sebagai seorang calon Bupati Katingan mengharapkan ke depannya, politik identitas itu sebaiknya tidak dimunculkan untuk menghindari gesekan dan konflik antar agama.

Sebagian besar informan berharap politik identitas itu terus berlanjut di masa yang akan datang. Mereka yang memunculkan politik identitas agama, meskipun kalah di Murung Raya mereka berharap tahun 2023 nanti mereka bisa menang. Mereka kalah karena pemilih muslim terpecah dan adanya dugaan faktor X. Solusi ke depan perlu adanya Demokrasi Konsosiasional.

Jika ditilik dari sisi sejarah, maka politik identitas sudah berkembang sejak lama, baik di Indonesia maupun dunia internasional. Di ranah politik dunia internasional, politik identitas ini lahir pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Dia lahir ketika masalah gender, etnis, feminisme, dan kelompok sosial lainnya merasa terpinggirkan atau terisolasi. Kelompok marginal dan subordinatif diperalat oleh kepentingan-kepentingan tertentu untuk mewujudkan tujuannya. Dalam perkembangan selanjutnya, politik identitas ini mencakup masalah agama, kepercayaan, dan ikatan-ikatan sosial lainnya. Sementara itu, dalam konteks Indonesia, politik identitas lebih berhubungan dengan etnisitas, ideologi, dan kepentingan-kepentingan lokal.

Konteks kehidupan berdemokrasi, politik identitas akan membawa masalah bagi demokrasi setidaknya dilihat dari dua hal utama.

Pertama, demokrasi lahir dan tumbuh dari prinsip kesetaraan dan rasionalitas publik. Politik identitas, di level ini berusaha menginterupsinya dengan menjadikan pilihan publik berjangkar pada ikatan primordial seperti kesamaan etnisitas, kesukuan, dan agama. Hal tersebut tidak bermasalah sejauh kualitas, kredibilitas, dan rekam jejak calon menjadi pertimbangan lain. Namun, politik identitas akan bermasalah ketika ikatan emosional jauh lebih dikedepankan dibanding alasan yang lebih rasional.

Kedua, politik identitas riskan untuk digiring menjadi praktik yang monolitik. Pemaksaan kehendak sebagai perwujudan *truth claim* dikhawatirkan akan menambah permasalahan sosial di tengah masyarakat. Rajutan persatuan dan kesatuan bangsa pada titik ini tentu akan mendapati tantangan yang amat serius. Sementara, dalam konteks konsolidasi demokrasi untuk sebuah negara bangsa yang plural seperti Indonesia, kohesivitas sosial adalah salah satu syarat demokrasi substansial dapat tumbuh subur dan berkembang.

Jika kedua masalah ini dibiarkan berkembang di ranah publik, maka demokratisasi akan kehilangan taji. Pesta demokrasi lima tahunan tidak lagi menjadi tontonan menarik, namun akan menjadi pertarungan kelompok sosial yang satu dengan yang lainnya.

Politik identitas pada hakikatnya baik, sejauh untuk menunjukkan identitas dalam upaya pengenalan dalam perbedaan dan dimaknai dalam bingkai kebhinekaan atau filosofis Huma Betang. Namun menjadi soal, ketika diejawantahkan secara tidak benar.

Di lokus penelitian politik ini, hasil pilkada serentak Tahun 2018 di Kabupaten Katingan dan Murung Raya cukup menarik. Karena meskipun mayoritas penduduk kedua kabupaten tersebut muslim, tapi yang terpilih adalah pasangan Kristen dan Muslim. Berbeda halnya dengan hasil pilkada di Barito Utara, karena mayoritas penduduknya Muslim dan calon bupatinya adalah Petahana (H. Nadalsyah) yang dinilai sukses dan berhasil oleh masyarakat membangun Barito Utara sehingga masyarakat memilihnya kembali. Ditambah lawannya tidak cukup terkenal di masyarakat. Bahkan di tengah masyarakat ada istilah “Meskipun dipasangkan dengan tunggul, pasti menang.”



V

PENUTUP

Suku Bakumpai adalah suku yang memiliki *gaiarah* keagamaan yang baik, hal ini melekat jika bersuku Bakumpai pasti adalah penganut agama Islam. Namun, Suku Bakumpai sampai saat ini belum memiliki pola dan konsep untuk mengusung warganya menjadi Pemimpin Daerah. Kader-kader warga Bakumpai mayoritas di Partai Politik yang berbau Nasionalis dan Agama Islam, sehingga warga Bakumpai secara alamiah tumbuh secara mandiri. Sikap warga Bakumpai terhadap proses suksesi kepemimpinan adalah bahwa warga Bakumpai sebagai warga negara yang baik selalu berpartisipasi baik dalam penyelenggaraan maupun ikut menyukseskan Pemilu yang diselenggarakan pemerintah, meskipun pada sisi lain, mereka memilih apatis jika calon pemimpin belum memiliki visi pembangunan yang baik. Artinya, mereka akan memilih golput jika calon pemimpin tersebut menurut pandangan mereka tidak sesuai dengan pandangan mereka sendiri.

Politik Identitas adalah Politik yang dimainkan oleh elit-elit partai untuk menggalang dukungan elektibilitas pada kancah Pemilu. Di tiga Kabupaten lokus penelitian, yang menonjol ternyata adalah Politik Identitas yang mengarah pada sentimen agama, karena warga Bakumpai

yang agamis akan memilih calon yang seakidah dengan mereka. Hal ini ditemukan di beberapa daerah yang menyatakan lebih baik golput dari pada memilih calon yang bukan seakidah dengan mereka. Meskipun demikian, calon-calon dari warga Bakumpai di dua daerah Katingan dan Murung Raya kalah oleh calon non-Muslim. Hal ini berdasarkan hasil wawancara bahwa orang Bakumpai belum memiliki pola khusus dalam memenangkan kandidatnya.

Calon orang Bakumpai tersebar di beberapa parpol sehingga akan sulit memberikan dukungan penuh, seperti Pilkada Murung Raya dan Katingan. Calon dari Bakumpai terdapat beberapa pasang hingga suara warga terpecah dan tidak fokus pada satu dukungan. Berbeda dengan Barito Utara, yang meskipun kandidatnya sama-sama orang Bakumpai, namun salah satu kandidat didukung oleh partai tertentu yang menurut kacamata warga tidak memperjuangkan aspirasi rakyat dan kandidat pertahanan yang sudah merakyat dan memiliki kinerja baik hingga pertahanan bisa menang telak. Ternyata Politik Identitas sentimen agama terbukti di Barito Utara. Warga Bakumpai berharap tentang sosok pemimpin yang amanah, memperhatikan kebutuhan rakyatnya, tidak berbohong, selalu menepati janji kampanyenya seperti gambaran salah satu pimpinan yang terpilih hasil pilihan rakyatnya yang tidak memandang sebagai politik identitas, namun lebih pada kinerja calon pimpinan yang bersangkutan hingga muncul istilah “berpasangan dengan tunggul pun beliau pasti akan menang”.

Angka partisipasi warga Bakumpai dalam Pilkada masih belum maksimal, sehingga diharapkan pada penyelenggara pemilu lebih mengintensifkan sosialisasi pemilu di kalangan warga masyarakat. Namun, untuk rekrutmen relawan muda dalam mensosialisasikan proses Pemilu seperti yang dilakukan oleh KPU Kota Palangkaraya sepertinya cukup efektif dan harus terus dilanjutkan karena keberhasilannya dalam menggalang partisipasi pemilih mencapai 70% lebih.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, S. 2018, Januari 3. Politik Identitas Masyarakat Menguat. *Harian Pikiran Rakyat*. Edisi 3..
- Anyang, Thambun, Y.C. 1998. *Kebudayaan dan Perubahan Daya Taman Kalimantan Dalam Arus Modernisasi*. Jakarta: Gramedia.
- Abdillah, Ubed. 2002. Politik Identitas Etnis, Pergaulan Tanda Tanpa Identitas. Magelang Indonesia Tera PENERBIT?
- Barker, Chris. 1999. *Cultural Studies, Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Benteng Pustaka.
- Barut, Kementerian Agama Kab. 2018. Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara; jumlah umat beragama. Kemenag Barut.
- Budhi, Setia. Etnisitas dan Penyebaran Orang Bakumpai Rekonstruksi Sosial Huma Hai'. presented at the seminar dalam rangkaian Festival Budaya Bakumpai, Aula Asrama Haji Palangka Raya, April 11, 2017.
- Budiardjo, Miriam. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cressida, Heyes. 1977. Identity Politics'. Stanford Encyclopedia of Philosophy, n.d.
- dkk, M.Idwar Saleh. *Adat Istiadat Daerah Kalimantan Selatan, Banjarmasin*. Banjarmasin: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah..

- Duverger, Maurice. 2002. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadi, Rizali. 2015. *Mengungkap Peran Orang Dayak Bakumpai Memelopori Perdagangan ke Sungai Katingan*. Banjarbaru, Kalimantan Selatan: PADMA Publisher & Communications.
- Katingan, Kementerian Agama Kabupaten. 2015. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama. Kemenag Katingan.
- Koentjaraningrat. 2000. *Kebudayaan mentalitas dan pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Liliweri, Alo. 2003. *Dasar-dasar Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maulani, Z.A. 2000. *Pedalaman Kalimantan; Kearifan Budaya dan Etnik dalam Demokrasi dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: CRDS, Pustaka Pelajar.
- Maunati, Yekti. 2004. *Identitas Dayak, Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: LKiS.
- Mura, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten. 2018. Data Jumlah Pemilih Tetap. KPU kabupaten Murung Raya.
- Nasrullah, Nasrullah. 2017. 'Mampalampang' Budaya Dayak Bakumpai (Sebuah Diskusi Awal). presented at the seminar Bakumpai Pengurus Cabang Kerukunan Keluarga Bakumpai, Aula Astana Haji Palangka Raya, 11.
- Panggabean, P. 1994. *Political Education and Nation Cadreation*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Pariwisata, Departemen Kebudayaan dan Pendidikan. 2005. *Multikultur*. Jakarta: Karya Agung.
- Prasojo, Zaenuddin Hadi. 2017. Social Change and the Contributions of the Tionghoa, Dayak and Melayu (Tidayu) in West Kalimantan. In *Borneo Studies in History, Society and Culture*, edited by Victor T. King, Zawawi Ibrahim, and Noor Hasharina Hassan, 427–42. Asia in Transition. Singapore: Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-10-0672-2_20.
- Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z Rubin. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riwut, Nila. 1993. *Kalimantan Memanggil*. Jakarta: Endang. 2007. *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*. Jakarta: Endang.
- Syamsuddin, Din. 2018 (August 7). Din: Politik Identitas Itu Sah-Sah Saja. Hidayatullah.com.
- Setyaningrum, Ary. 2003. *Memetakan Lokasi Bagi Politik Identitas dlam Wacana Politik Poskolonial dalam Politik Perlawanan*. Yogyakarta: IRE.

Tengah, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan. 2018 (May 14) Jumlah Penduduk di Kalimantan Tengah Berdasarkan Suku. *BPS*.

Tengah, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan. 2018. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku dan Agama *BPS*.

Ukur, Frodlin. 2000. *Tantang Jawab Suku Dayak*. Jakarta: Gunung Mulya.

Wahid, Abdurrahman. 2009. *Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Jakarta, The Wahid Institute.

Proof